

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

KALEIDOSKOP 2020

Edisi 24
Desember 2020



TIM REDAKSI

Pengarah:
Ismail

Wakil Pengarah:
Phillip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Ferdinandus Setu

**Wakil
Pimpinan Redaksi:**
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
Frans Bambang Irawan,
M. Taufiq Hidayat,
Verawati,
Annisa Bonita P.

Reporter:
Patricia Samantha S.
Yusuf,
Ahmad Irso Kubangun

Fotografer:
Agus Yudi Harsono,
Doni Paulus Sumule,
Sri Indrati Noviansari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka,
Rahma Aulia Indroputri,
Lamza Rachmattunisa

Produksi:
Fahmi Trihatin J.,

Kaleidoskop 2020

Ada dua pengertian Kaleidoskop pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 1) alat optik yang bentuk luarnya seperti keker, dilengkapi dengan dua kaca persegi panjang yang dipasang pada lapisan dalam pada salah satu ujungnya sehingga dapat memperlihatkan pelbagai gambaran yang indah dan simetri 2) aneka peristiwa yang telah terjadi yang disajikan secara singkat.

Kali ini kita mengacu pada pengertian kedua: aneka peristiwa yang disajikan secara singkat. Banyak peristiwa terjadi di tahun 2020. Satu peristiwa besar yang mewarnai seluruh perjalanan hidup manusia di bumi adalah: Pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus yang belum diketahui itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China. Kemudian, pada 1 Januari, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) membuat sebuah tim untuk menghadapi kemungkinan pandemi. Pada 4 Januari, WHO melaporkan kluster kasus pneumonia tanpa kematian di Wuhan. 9 Januari, kasus kematian pertama di Wuhan.

Presiden RI Joko Widodo mengumumkan kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia pada Senin, 2 Maret 2020 yang ditularkan melalui transmisi dari manusia ke manusia. Sejak saat itu COVID-19 menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa Indonesia. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun digelar untuk mengurangi penyebaran virus. Gerakan 3 M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak) dikampanyekan melalui seluruh saluran.

Tim redaksi Majalah KominfoNext pun mengangkat topik COVID-19 di tiga edisi secara berturut-turut. Edisi April mengangkat topik Bersatu Melawan

COVID-19. Bulan Mei dengan topik Menuju New Normal. Bulan Juni menampilkan tema Adaptasi Kebiasaan Baru. Melalui ketiga edisi tersebut, kami menampilkan Langkah-langkah strategis pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran pandemi COVID-19.

Anugerah Jurnalistik Kominfo 2020 pun mengangkat tema "Bangkit dari Pandemi COVID-19: Menuju Masyarakat Produktif". Tema ini diangkat secara khusus untuk bisa memberikan penghargaan bagi para jurnalis yang telah berjuang di garis terdepan, melaporkan dan menyajikan--termasuk menulis, meliput dan memotret--informasi terkini seputar COVID-19 kepada masyarakat melalui karya jurnalistik mereka.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengambil sejumlah kebijakan untuk ikut membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Aplikasi PeduliLindungi, chatbot WhatsApp, portal covid19.go.id, penanganan hoaks terkait COVID-19. Yang tak kalah pentingnya adalah komunikasi publik untuk meminta masyarakat jaga jarak: bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah, tak henti dilakukan. Seluruh kanal dipakai, dari media cetak, televisi, radio, elektronik hingga media sosial.

Penanganan pandemi COVID-19 dan seluruh peristiwa menarik di sektor Kominfo pun kami sajikan secara singkat melalui edisi akhir tahun ini.



Selamat membaca

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat

@FSetu @FSetu FSetu TV

Daftar

Isi

2

Surat dari MMB 9

4

Perspektif
Menteri

6

Kabar dari Istana

10

Tokoh

14

Kabar Seputar COVID-19

16

Foto Esai

24

Liputan Khusus

46

KomEvent

24

Liputan Khusus

50

Liputan Utama

62

Kominfo Daerah

66

Jurnal Foto

2020: *Annus Horribilis* atau *Annus Mirabilis?*

Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun. Tahun 2020 akan segera kita tinggalkan. Tahun yang tak akan pernah terlupakan karena menjadi tahun yang sangat berat akibat krisis pandemi di seluruh dunia. *Annus horribilis*. Tahun yang mengerikan. Penuh horor karena tingkat kematian dan penderitaan yang tinggi, ditambah dengan mandeknya ekonomi dunia. Hampir semua negara masuk ke dalam resesi, tak terkecuali kita, Indonesia.

Namun kita juga bukan umat yang tak pandai bersyukur. Kita melihat karya baik Allah tetap berjalan melalui teknologi, terutama teknologi digital. Justru pada masa serba-pembatasan-sosial ini, teknologi digital memainkan peran pembebasannya. Kegiatan-kegiatan masif umat manusia, yaitu bekerja, belajar, dan beribadah, dapat terus bebas dilangsungkan selama masa pandemi berkat kemajuan teknologi informasi. Teknologi digital menjadi "teknologi pembebasan".

Berapa kegiatan kita yang terpaksa digelar melalui teknologi *virtual meeting* seperti Zoom? Dari mulai rapat, sekolah, sampai ibadah, kita selenggarakan melalui *virtual meeting*. Ketika kita harus menahan diri agar sedapat mungkin mengurangi penularan virus akibat kontak fisik di kerumunan, teknologi digital dapat menjadi solusinya. Aplikasi *virtual meeting* seperti Zoom, Google Meet, Webex, dan lain-lain melonjak drastis menjadi aplikasi paling digunakan dan digunakan oleh masyarakat.

Akibatnya, hanya dalam hitungan bulan, valuasi Zoom membengkak sampai bisa melampaui Exxon. Menurut Forbes, pada akhir Oktober lalu, Zoom mencatatkan valuasi pasar \$139 miliar, sementara Exxon \$138,9 miliar. Padahal Zoom memulai tahun ini dengan kapitalisasi pasar hanya sekitar \$19 miliar saja. Pendiri Zoom, Eric Yuan, juga langsung masuk dalam jajaran 400 orang terkaya di Amerika Serikat versi Forbes.

Pada saat yang sama, operasional Exxon telah mengalami tekanan akibat pandemi. Mereka mengumumkan akan memberhentikan 1.900 karyawannya di Amerika Serikat untuk mengurangi biaya pengeluaran dan meningkatkan efisiensi selama pandemi. Cerita ini melengkapi kisah-kisah fenomenal bisnis perusahaan rintisan (startup) sebelumnya yang melampaui perusahaan-perusahaan mapan seperti Google, Facebook, Alibaba, dan lain-lain.

Bagi kita yang berkuat pada sektor teknologi informasi dan komunikasi, apalagi bagi Eric Yuan, justru tahun ini merupakan tahun yang penuh keajaiban. *Annus mirabilis*. Tahun mukjizat.

Untuk pertama kalinya sektor komunikasi dan informatika pernah menjadi sektor tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi sektoral. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor usaha informasi dan

komunikasi mencapai 10,61 persen dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2019 lalu. Pada kuartal ketiga tahun lalu, pertumbuhan sektor ini mencapai 9,24 persen. Tingkat pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi ini menjadi yang kedua tertinggi setelah pertumbuhan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial pada kuartal ketiga ini, yang berhasil tumbuh 15,33 persen. Malah pada kuartal kedua tahun 2020 ini, pertumbuhan sektor usaha informasi dan komunikasi sempat menduduki peringkat tertinggi.

Fenomena ini didorong oleh kebutuhan akan informasi dan produktivitas yang harus dilakukan secara jarak jauh dan daring. Masyarakat juga telah mulai memiliki budaya baru, habitus baru, untuk mengurangi pergerakan fisik dan menggantungkan sepenuhnya kepada teknologi digital. Gaya hidup dan gaya kerja digital menjadi bagian dari kenormalan baru yang perlu terus dibudayakan agar masa pandemi dapat menjadi momentum meningkatkan produktivitas, kegesitan, dan daya saing bangsa. Inilah disrupsi yang telah dibangun oleh teknologi digital dan dipercepat implementasinya lantaran krisis COVID-19. *Agility* atau kelincahan beradaptasi sangat penting agar tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 ini.

Sementara itu, pemerintah akan terus mengalokasikan belanja negara untuk percepatan transformasi digital pada sektor-sektor strategis, termasuk sektor pemerintahan sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Pelayanan publik seperti perizinan, kesehatan, pendidikan, penyiaran, penyediaan infrastruktur jaringan internet cepat, dan pencetakan sumber daya manusia talenta digital kian diperlukan untuk mendukung aktivitas perdagangan digital dan industri.

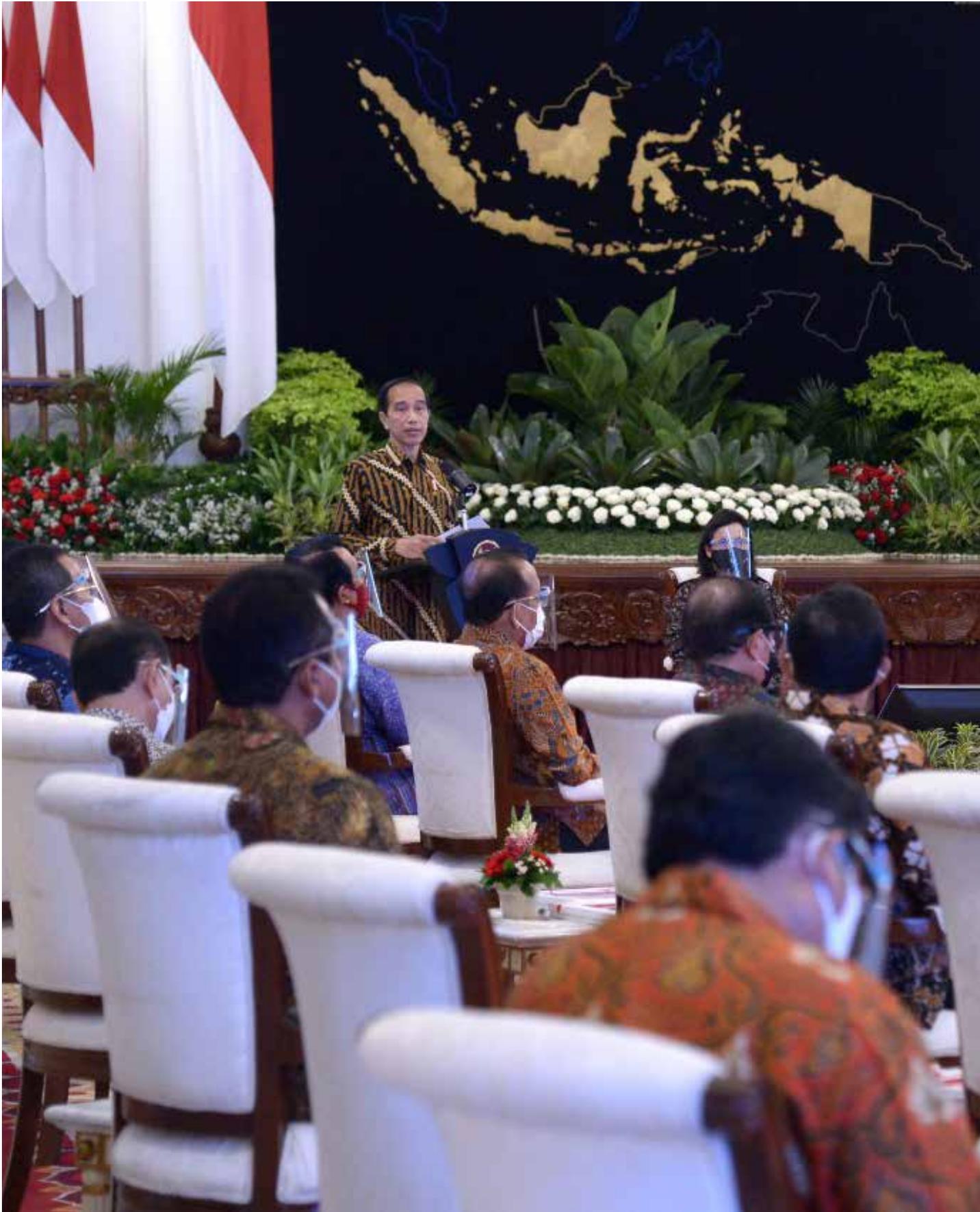
Sementara itu, Google, Temasek, dan Bain dalam laporan tahunan bertajuk "e-Conomy SEA 2020" menyebutkan bahwa diperkirakan

nilai ekonomi berbasis internet di Asia Tenggara tahun 2020 ini mencapai US\$ 105 miliar atau sekitar Rp 1.475 triliun. Sebanyak US\$ 44 miliar atau Rp 619 triliun di antaranya disumbang oleh Indonesia. Indonesia masih merupakan ekonomi berbasis internet terbesar di Asia Tenggara dengan penguasaan sebanyak 42%. Bersama Vietnam, ekonomi berbasis internet Indonesia diprediksi akan terus tumbuh dalam dua digit di tahun-tahun mendatang. Nanti pada tahun 2025, mereka proyeksikan nilai ekonomi berbasis internet Indonesia akan mencapai US\$ 144 miliar.

Lagi-lagi, krisis pandemi COVID-19 justru menjadi pemicu akselerasi ekonomi berbasis internet ini. Seperti yang disampaikan oleh laporan tersebut: Selain pengguna daring baru, krisis COVID-19 justru menyebabkan percepatan konsumsi digital karena banyak pengguna mencoba layanan digital baru untuk pertama kalinya. Lebih dari 1 dari setiap 3 konsumen layanan digital di Asia Tenggara mulai menggunakan layanan gara-gara COVID-19. Sektor pendidikan, perdagangan, dan kredit merupakan sektor-sektor yang paling banyak mendapat serbuan konsumen digital baru tersebut. Di Indonesia, sejumlah 56% pengguna digital baru selama pandemi berasal dari pedesaan.

Kita jelas berduka atas korban jiwa dan kerugian material yang diakibatkan oleh pandemi sepanjang tahun 2020 yang akan segera kita tinggalkan. Namun sebagai umat yang tawakal dan beriman, kita juga mensyukuri perlindungan dan nikmat lain yang selalu diberikan oleh Yang Mahakuasa. Dengan keyakinan tersebut, mari kita berikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga kita, tetap memohon agar krisis ini segera berlalu, tetap optimistis bahwa Allah bersama kita, dan tetap selalu bersiap untuk menyambut era pasca-pandemi yang lebih cerah.

Sumber Foto : www.presidentri.go.id



Empat Fokus Kebijakan Pemerintah dalam APBN 2021

Kecepatan dan ketepatan harus tetap menjadi karakter kebijakan-kebijakan pemerintah meski berhadapan dengan tantangan pandemi. Untuk itu, dalam APBN tahun 2021 mendatang, pemerintah telah menentukan empat fokus kebijakan. Keempatnya ialah penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 di Istana Negara, pada Rabu, 25 November 2020.

"Kita tahu semuanya dan sudah merasakan bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit untuk kita lalui. Di tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian," ujarnya mengawali sambutan.

Fokus kebijakan pertama yang ditempuh pemerintah ialah pada penanganan kesehatan yang utamanya menitikberatkan pada vaksinasi COVID-19.

"Anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium penelitian, dan pengembangan sangat diperlukan," kata Presiden.

Selain melakukan penanganan kesehatan akibat pandemi, pemerintah juga tetap akan berfokus pada kebijakan-kebijakan

yang berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang rentan dan kurang mampu.

Dalam hal pemulihan ekonomi, pemerintah akan memberi dukungan yang lebih besar bagi perkembangan dunia usaha, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Adapun fokus yang keempat yakni membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain sebagainya.

"Dalam APBN tahun 2021 pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun. Ini tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi ini terdiri atas belanja untuk kementerian dan lembaga sebesar Rp1.032 triliun. Untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp795,5 triliun," Presiden menjelaskan.

Alokasi belanja tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan prioritas pembangunan di berbagai bidang.

"Kesehatan misalnya sebesar Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan bidang teknologi dan informasi Rp26 triliun, dan seterusnya," ucap Presiden.

Sumber Berita :

https://www.setneg.go.id/baca/index/empat_fokus_kebijakan_pemerintah_dalam_apbn_2021



Sumber Foto : www.presidentri.go.id



Presiden Jokowi: Perlu Transformasi Besar Pasca Pandemi

Pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran berharga bagi seluruh negara di dunia. Saat ini juga merupakan waktu bagi semua negara untuk melakukan introspeksi, bukan hanya agar pulih dari krisis kesehatan dan ekonomi, namun bangkit dan tumbuh lebih kokoh.

Saat menyampaikan pidatonya melalui konferensi video pada Sesi II Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemulihan dari pandemi tersebut hanya bisa diwujudkan jika terdapat visi, aksi, dan perubahan besar. Sesi tersebut mengangkat tema “Membangun Masa Depan yang Inklusif, Berkelanjutan, dan Tangguh”.

“Hal ini bisa diwujudkan jika terdapat visi besar, aksi besar, dan perubahan besar. *Big vision, big action, and big transformation,*” kata Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu, 22 November 2020.

Sejalan dengan tema pertemuan, Presiden menuturkan bahwa pascapandemi Indonesia ingin membangun ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan tangguh. Untuk itu, pembenahan fundamental mutlak dilakukan.

“Indonesia juga ingin melakukan transformasi besar. Menjadi komitmen Indonesia untuk menuju ekonomi lebih hijau dan berkelanjutan. Geliat pemulihan ekonomi tidak boleh lagi mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan,” jelasnya.

Sumber Berita :

https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_sebut_perlunya_transformasi_besar_pascapandemi_di_forum_ktt_g20

Menurut Presiden, saat ini adalah momentum untuk mendorong ekonomi hijau. World Economic Forum menyebut bahwa potensi ekonomi hijau sangat besar, di mana terdapat peluang bisnis sebesar US\$10,1 triliun dan 395 juta lapangan pekerjaan baru hingga tahun 2030.

Di Indonesia sendiri berbagai terobosan telah dilakukan, antara lain memanfaatkan biodiesel B-30, menguji coba *green diesel* D100 dari bahan kelapa sawit dan menyerap lebih dari 1 juta ton sawit produksi petani, serta memasang ratusan ribu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di sektor rumah tangga.

“Proyek ini akan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru sekaligus berkontribusi pada pengembangan energi masa depan,” imbuhnya.

Di samping itu, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan parlemen juga memberikan kepastian terkait persyaratan izin lingkungan, analisis dampak lingkungan, dan pembentukan dana rehabilitasi lingkungan.

“Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan bagi hutan tropis, sebagai benteng pertahanan terhadap perubahan iklim. Ini adalah komitmen Indonesia,” tegasnya.

Di penghujung pidatonya, Presiden kembali menekankan bahwa pemulihan bersama secara lebih kuat membutuhkan visi, aksi, dan transformasi besar. Hal tersebut harus dilakukan negara G20 untuk membangun ekonomi dunia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.





Jubir Ala Kominfo:

Yang Muda

Yang Bicara

Melibatkan kaum milenial dalam mengemban amanah negara tidak saja dilihat dari pengalaman baik di jenjang pendidikan, karir, dan lain-lain. Lebih dari itu, mereka adalah representasi dari suara anak muda. Seperti dalam struktur organisasi kementerian/lembaga yang sebagian dimandatkan kepada anak muda.

Keterlibatan peran pemuda menandakan keseriusan pemerintah memberikan bekal

pengalaman nyata dalam mengelola negara. Sebagaimana pesan the *founding father* bahwa masa depan bangsa ada di tangan pemuda.

Artikel ini akan mengulas secara singkat profil dua anak muda yang dipercayakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai Juru Bicara Kementerian Kominfo (Jubir Kominfo). Seperti kita ketahui bahwa Kementerian Kominfo merupakan institusi yang memiliki peran strategis di bidang komunikasi dan informatika. Sehingga, menyelesaikan persoalan komunikasi di Indonesia yang mencakup literasi sebagai dasar kemampuan bercakap, pemberantasan segala bentuk disinformasi/ hoaks yang berkebar di ruang digital serta bagaimana membangun orkestrasi komunikasi publik dengan tujuan

mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu melibatkan kontribusi milenial Indonesia.

Sebagai lembaga strategis dalam menyelesaikan persoalan bangsa di bidang komunikasi dan informatika, tentu membutuhkan SDM yang unggul, kreatif serta mampu melahirkan ide dan gagasan yang 'out of the box' demi kemajuan bangsa. Sehingga tidak jarang anak muda diberikan kesempatan untuk berkiprah mewujudkan visi besar tersebut. Berikut ini dua sosok anak muda yang mewakili kaum milenial yang dipercaya Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai Juru Bicara Kementerian Kominfo : Yang Muda Yang Bicara.

Dedy Permadi

Perjalanan dan pengalaman panjang sebagai seorang akademisi membuat Dr. Dedy Permadi menjadi sosok yang sering muncul di hadapan publik untuk mensosialisasikan program-program Kementerian Kominfo. Kepiawaiannya dalam mengatur ritme kerja akhirnya membawanya untuk diangkat menjadi Juru Bicara Kementerian Kominfo.

Putra kelahiran 23 Juni 1986 itu merupakan lulusan S-1 tahun 2007 Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Dua tahun kemudian tepatnya tahun 2009 menyelesaikan studi master pada jurusan yang sama. Kemudian pada tahun 2012, Dedy Permadi melanjutkan studi S-3 di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.

Pria berusia 34 tahun itu juga pernah mendapatkan kesempatan menjadi Visiting Doctoral Student di Department of Politics and International University of Oxford pada tahun 2015-2016. Di samping menuntaskan gelar Doctoral-nya, Dedy mendedikasikan pengalamannya menjadi dosen tetap sekaligus sebagai Sekretaris Departemen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM, kemudian pernah dipercayakan menjadi Managing Director Center for Digital Society (CfDS) di FISIP UGM.

Perjalanan karir sebagai seorang akademisi di bidang sosial dan politik dan aktif melakukan kajian-kajian tentang masyarakat digital, pada akhirnya menghantarkan Dedy Permadi menjadi Juru Bicara Kementerian Kominfo hingga saat ini. Sebelumnya, Dedy Permadi mengemban amanah sebagai Ketua Umum Gerakan Nasional Literasi Digital atau Siberkreasi yang merupakan kumpulan komunitas/kelompok literasi digital yang digagas oleh Kementerian Kominfo. Salah satu karya yang pernah diluncurkannya adalah penelitian tentang kota cerdas yang dituangkan dalam buku berjudul "Menuju Kota-Kota Sekunder Pintar: Pemetaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pelayanan Publik di 12 Kota di Indonesia"





Dewi Meisari

Diangkat sebagai Wakil Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dewi Meisari menghadirkan sejumlah gagasan yang menasar pada bagaimana implementasi program dan kebijakan strategis Kementerian Kominfo yang telah berjalan baik sejauh ini lebih dikembangkan lagi dalam bentuk adopsi kekinian.

Bernama lengkap Dewi Meisari Haryanti, SE, M.SC kelahiran Pontianak, 7 Mei 1983, Mbak Dewi panggilan akrabnya ini merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 2006, kemudian melanjutkan program magister di Department of Development and Natural Resources Economics Norwegian University of Life Science lulus tahun 2010.

Deretan pengalaman kerja yang dimiliki membuat dosen FEUI ini dipercayakan Menteri Kominfo Johnny G. Plate untuk menjadi Wakil Juru Bicara yang secara spesifik memiliki tugas-tugas penting membantu Dedy Permadi.

Inilah beberapa perjalanan studi dan karir Wakil Juru Bicara Kementerian Kominfo yakni; Junior Program Manager at PUSAT UKM – FEUI (2007-2008), Consultant Team Member at Coordinating Ministry of Economy, for MP3EI Project (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) – for Kalimantan Economic Corridor (Februari – April 2011), Teaching staff (lecturer) at FEUI Microeconomics, Microfinance Policy, Cooperatives and SMEs, Economics of Poverty, and People-Based Policy Planning (2011-sekarang), Assistant of Vice Director of UKM Center FEB UI (SME Center FEB UI) pada tahun 2011 – September 2012, Deputy Director of UKM Center FEB UI (SME Center FEB UI) tahun 2012 – 2014 dan Advisor at Koperasi Kasih Indonesia (2013 – sekarang).

Selain pengalaman panjang di dunia akademisi, perempuan berusia 37 tahun itu juga menorehkan namanya di industri wirausaha di Tanah Air, yakni sebagai Co-Host Educational Podcast for MSMEs – CERITA USAHA (@spotify, anchor, apple podcast, etc) dari tahun 2018 – sekarang, Host of Educational Porcast for Women Entrepreneurs – PEREMPUAN BISA BERWIRAUSAHA (@Inspigo), Founding member of Indonesia Social Entrepreneurship Network (ISEN), Head of Research and MSMEs database – APINDO, division of UMKM/IKM, Program Coordinator Start-up Accelerator Program at University of Indonesia “UI Works”, dan Lead author and editor, for Women Entrepreneurship Module at welearn.unwomen.org serta masih banyak lagi karir dan jabatan strategis yang dipegang saat ini.

Kolaborasi Jubir - Wajubir

Mengenal perjalanan karir di dunia pendidikan, pengalaman kerja berikut karya dan prestasi yang diraih Juru Bicara Dedy Permadi dan Wakil Juru Bicara Dewi Meisari, satu hal yang menarik adalah kolaborasi antara lulusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan lulusan Ekonomi dan Bisnis yang jika dikaitkan dengan program dan kebijakan di Kementerian Kominfo akan selaras dengan kinerja dua Juru Bicara ke depannya.

Menurut Dewi Meisari peran Juru Bicara pada dasarnya adalah menyampaikan progres kinerja pemerintah dengan benar sehingga sebisa mungkin membangun ekspektasi yang sesuai. Dalam hal ini, secara khusus peran Wakil Juru Bicara, Dewi Meisari memposisikan diri sebagai edukator untuk membantu program Kementerian Kominfo seperti literasi digital dan pentingnya memahami "saring sebelum *sharing*." Sebab, meningkatkan literasi digital masyarakat tidak terlepas dari fungsi edukasi.

Sementara peran Juru Bicara Dedy Permadi lebih mengarah pada isu-isu strategis kebijakan, regulasi dan akselerasi kinerja bersama mitra Kementerian Kominfo. Kolaborasi ini menandakan Kementerian Kominfo sebagai institusi yang dari sisi edukasinya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemerintah bukan hanya sekedar regulator, tetapi juga wajah pengayom.

Salah satu program yang dijalankan Kementerian Kominfo adalah menghadirkan semakin banyak startup rintisan karya anak bangsa. Program tersebut bekerja sama dengan berbagai pihak khususnya pelaku



UMKM agar memberikan stimulus dalam kesiapan migrasi dari UMKM fisik ke UMKM go digital. Artinya bahwa komitmen dan keseriusan dalam melaksanakan program dan kebijakan strategis pada hakekatnya sudah ada di Kementerian Kominfo. Oleh karena itu, meningkatkan kolaborasi menjadi ihwal penting.

Bagaimana langkah ke depan mewujudkan lahirnya startup digital yang terus melebarkan sayap menjadi *unicorn* hingga *decacorn*? Secara regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan penyiapan SDM digital, peran Juru Bicara akan dipegang oleh Dedy Permadi. Sementara sebagai Wakil Juru Bicara, Dewi Meisari lebih kepada pengembangan edukasi dan literasi yang selanjutnya menargetkan lahirnya lima *unicorn* setiap tahun dari berbagai program startup digital yang digagas Kementerian Kominfo.

Pemerintah Siapkan Sistem Satu Data

Vaksinasi COVID-19

<https://covid19.go.id/berita/pemerintah-telah-siapkan-sistem-satu-data-vaksinasi-covid-19>

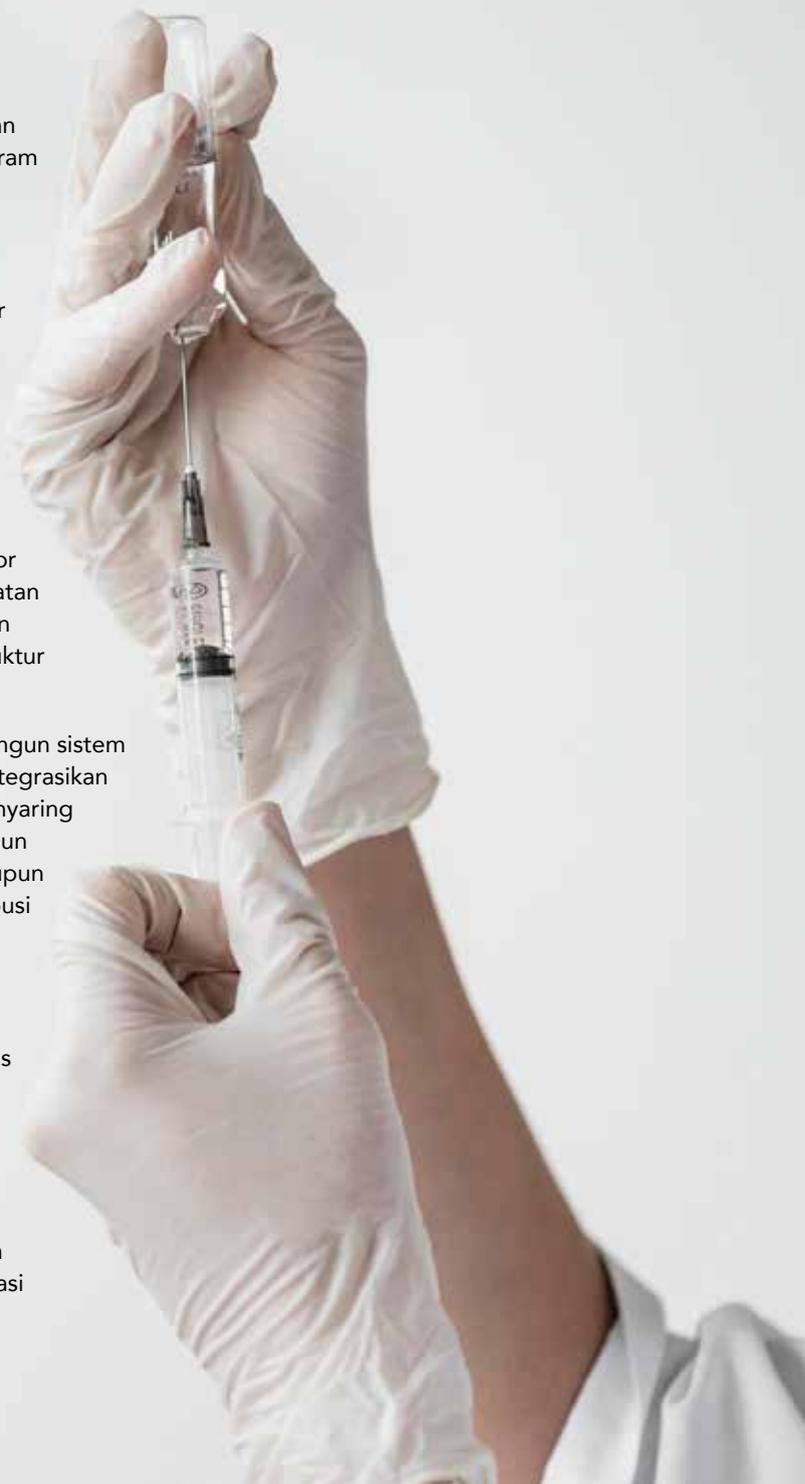
Saat ini pemerintah tengah berusaha untuk menahan laju penularan COVID-19, salah satunya dengan mendatangkan vaksin. Oleh karena itu, pemerintah mempersiapkan program vaksinasi ini dengan sebaik-baiknya.

Erick Thohir, Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam acara webinar dengan tema “Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19” yang diselenggarakan KPCPEN, Selasa (24/11). Erick menegaskan bahwa perjalanan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 nanti akan transparan.

“Sejak awal, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan juga pertemuan-pertemuan dengan para pakar seperti, ITAGI, IDI, semua kita libatkan, karena ini merupakan faktor terpenting dalam penanganan COVID-19 yaitu penyelamatan terhadap manusia. Dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data,” kata Erick.

Selain itu, terdapat juga lima tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin COVID-19. Pertama mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data. Kedua, menyaring data individu penerima vaksin prioritas. Ketiga, membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri. Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Kelima, memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.

Soleh Ayubi Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero) pada acara yang sama menyatakan bahwa proses dari ujung ke ujung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini bukan perkara mudah karena ini mungkin pertama kalinya kita melakukan hajatan sebesar ini terutama di bidang pelayanan kesehatan. “Proses ini akan melibatkan banyak pihak, apalagi melihat alur waktu dan jumlah yang akan divaksinasi itu luar biasa besar. Tentunya semua proses ini akan mengikuti berbagai regulasi seperti, regulasi



“Momentum ini sendiri menjadi lompatan bagi industri layanan kesehatan kita. Proses manual dalam industri layanan kesehatan kita, bisa kita otomatiskan. Ini akan menciptakan ekosistem layanan Kesehatan digital nasional yang tentu di bawah regulasi Kemenkes dan BPOM. Harapannya kita ingin pasien menjadi pusatnya nanti sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup yang berfokus pada pasien.”

Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM), Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta dukungan aparat keamanan,” tegas Soleh.

Untuk itu, pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mengotomatiskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini. Tujuan penggunaan teknologi ini adalah menghindari kesalahan serta mempercepat proses. “Proses-proses yang sebelumnya lama seperti, proses pendaftaran dan verifikasi, bisa dilakukan secara cepat. Dan yang terakhir kita berupaya menjaga kualitas, baik itu kualitas vaksinnya maupun kualitas pelayanannya,” tambah Soleh Ayubi.

Seluruh data penerima vaksin COVID-19 prioritas, kini sedang dalam tahap pencocokan dan pengintegrasian antar kementerian dan lembaga terkait. “Kita sedang mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, dan Polri. Sistem ini nanti akan bisa memberikan data baik untuk program vaksin COVID-19 pemerintah maupun program mandiri. Apabila sudah terdaftar dalam satu sistem, nanti tidak bisa terduplikasi atau terdaftar dalam sistem lainnya, sehingga

mengurangi kemungkinan duplikasi dan memberikan vaksin lebih tepat sasaran”, jelas Fajrin Rasyid, Direktur Digital Bisnis PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Sistem satu data ini telah disimulasikan sebanyak dua kali di tempat terpisah. Simulasi pertama dilaksanakan di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu (18/11) dan dihadiri Presiden Joko Widodo. Simulasi kedua dilakukan di Puskesmas Cikarang, Bekasi pada Kamis (19/11) dan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Presiden menyampaikan secara umum sistem ini sudah berjalan baik. Tentu ada satu dua masukan sehingga terus kita kembangkan”, terang Fajrin.

Sementara itu, Bio Farma dan anak perusahaannya mendapat mandat untuk melakukan pengadaan, pengemasan, dan pendistribusian vaksin COVID-19. “Bio Farma ditugaskan melakukan distribusi sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi. Dan mungkin juga akan dilibatkan ke dalam proses yang lain. Berkaitan dengan vaksin mandiri, tujuh BUMN Farmasi nantinya juga akan membuka layanan vaksinasi,” ujar Soleh.

Pemerintah telah menyiapkan dua skema vaksinasi yaitu, skema vaksinasi bantuan pemerintah



untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI, Polri, Satpol PP, Aparat Hukum, dan Peserta BPJS Penerima Bantuan luran, kedua adalah skema vaksinasi mandiri, yaitu vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh masyarakat secara perorangan. Erick Tohir menyampaikan bahwa kontribusi masyarakat yang mengikuti vaksinasi mandiri ini tidak kalah pentingnya, melihat penduduk Indonesia yang sangat besar.

“Sehingga tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih, sudah seyogyanya membantu pemerintah dengan membayar vaksinasi sendiri,” Tutupnya.





Kisah Lensa

Seperti kampung-kampung di kota Yogyakarta pada umumnya, sekilas tidak ada yang menonjol dari kampung ini. Akses menuju Kampung Cyber, Yogyakarta cukup sempit namun bersih hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. Semenjak dikunjungi oleh pendiri yang juga CEO Facebook, Mark Zuckerberg pada 2014, Kampung Cyber di Patehan, Kraton, Yogyakarta menjadi banyak dikunjungi wisatawan. Lokasinya yang tidak jauh dari wisata pemandian Taman Sari juga memudahkan wisatawan untuk berkunjung.

Foto dan Text : Indra Kusuma

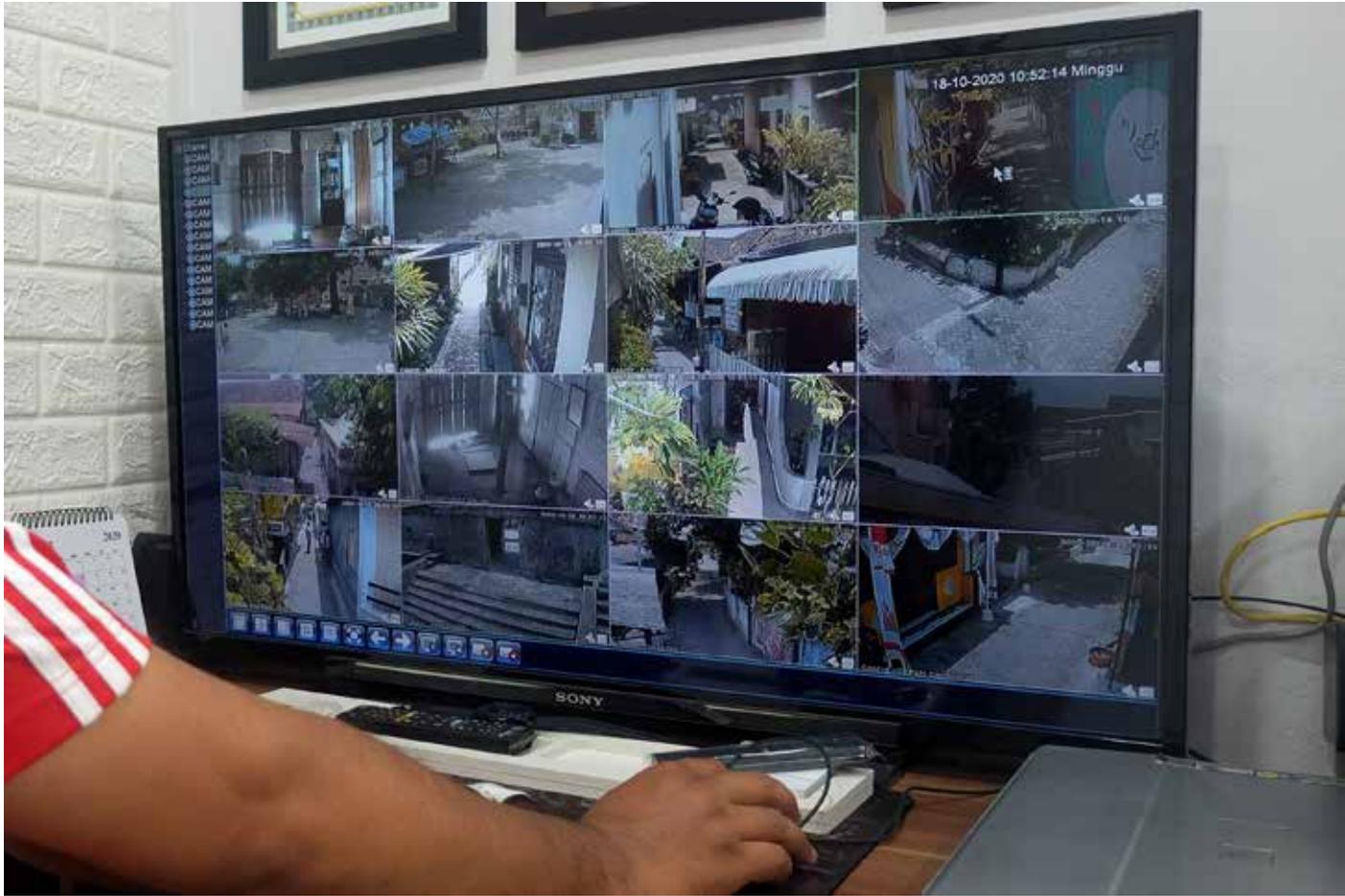




Berawal di tahun 2008, saat Antonious Sasongko memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan memilih untuk menjadi *freelancer* dengan bekerja dari rumah. Pria yang akrab disapa Koko ini awalnya berlangganan internet seorang diri karena kebutuhan pekerjaan hingga beberapa warga ikut tertarik. Dimulai dengan lima rumah membentuk jaringan dengan menggunakan kabel jaringan area lokal / *local area network* (LAN), proses berjalan sampai 2015 hingga seluruh kampung terkoneksi secara mandiri menggunakan uang iuran bersama. Cara ini bertujuan agar warga merasa memiliki karena dibangun dengan uang bersama sehingga dijaga dengan sungguh-sungguh secara bersama. Warga yang tadinya tidak pernah belajar internet kini menjadi mengerti hal yang bersifat teknis, mulai dari *crimping* kabel hingga *setting wifi*, walau berasal dari latar belakang pekerjaan yang berbeda, seperti tukang kayu, pelukis, dan lain-lain. Ketika masa pandemi ramai diberlakukan bekerja dari rumah, warga Kampung Cyber sudah terbiasa memasarkan produknya dengan cara online. Dengan iuran sebesar Rp 60.000 per *user name*, warga dapat memaksimalkan lima pengguna dengan kecepatan maksimal 25 Mbps tiap *user name*.

Pria lulusan jurusan Design Komunikasi Visual (DKV), Institut Seni Indonesia, Yogyakarta ini sejak 2015 mulai mengarahkan warga Kampung Cyber pada peningkatan ekonomi karena mayoritas warga yang berprofesi sebagai UMKM, dengan mengarahkan warga latihan membuat blog untuk mengenalkan lebih luas produk UKM nya. Hingga pada 2019 dibuat website untuk etalase digital khusus produk-produk hasil warga Kampung Cyber.



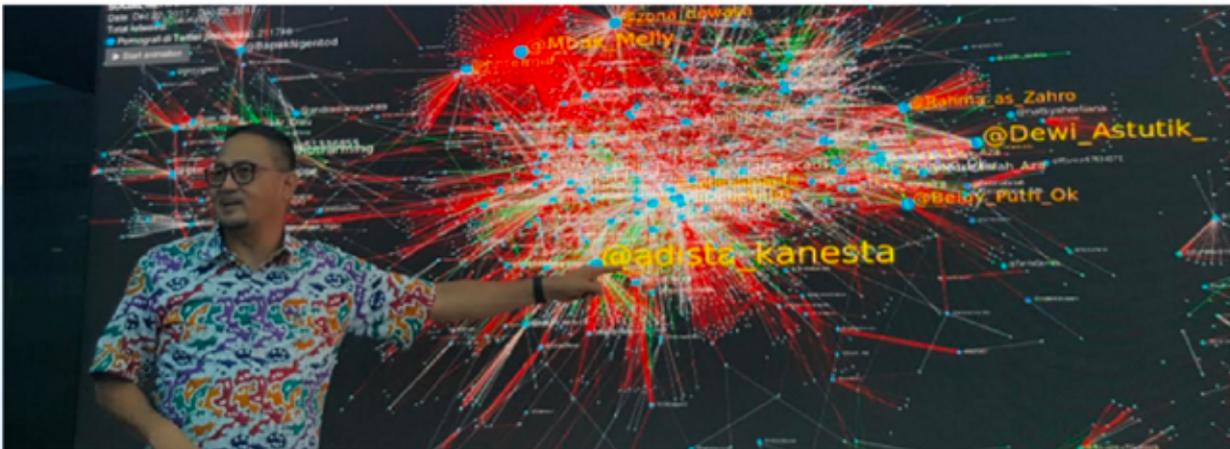






Kampung Cyber sering juga dikunjungi sebagai wisata edukasi wisatawan yang berasal dari dalam dan luar negeri, termasuk kunjungan dari rombongan Raja Belanda saat mengunjungi Yogyakarta di awal tahun 2020.

Tumpas Hoaks, Kominfo Fungsikan Mesin AIS Pantau Konten Internet



Sumber Foto : Kompas.com

Pada momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017, 2018, hingga Pemilu 2019 silam, jagat media sosial (medsos) di Indonesia menjadi ladang subur tumbuhnya peredaran berita hoaks atau kabar bohong. Bahkan, hoaks kerap dijadikan senjata oleh para oknum untuk menyerang lawan politik.

"Saya terus terang tidak memegang data pastinya tapi secara umum kalau kami pantau konten internet yang pakai domain.id, berita hoaks meningkat beberapa bulan terakhir," terang Direktur Operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) 2016-2018, Sigit Widodo, dikutip dari laman kominfo.go.id.

Pilkada yang dimaksud oleh Sigit tidak hanya yang di DKI Jakarta, namun juga pilkada yang diselenggarakan di seluruh pelosok nusantara. Dengan kemunculan hoaks yang seolah tanpa henti ini, pemerintah rupanya cukup direpotkan.

Dalam proses Pilkada 2017 yang sedang berlangsung kala itu, Sigit melihat pola tersebut kembali terjadi. Hanya saja menurutnya, Pilkada serentak kali ini jauh lebih kuat ketimbang yang digelar 2015 lalu.

"Kami melihat pilkada ini lebih kuat, ini agak mirip dengan pilpres. Jadi menjelang pilpres berita hoaks

meningkat, tapi setelah pilpres cenderung menurun," sambung Sigit.

Pada pilkada 2017 lalu, Sigit mengatakan ia menyoroti dua jenis konten yang kerap diembuskan oleh situs-situs berita abal adalah sentimen SARA dan pekerja China. Keduanya menjadi isu hoaks yang paling sering beredar.

Keterangan Sigit itu sejalan dengan data yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menemukan jumlah situs dan akun media sosial penyebar kebencian serta berita bohong bertambah. Dalam kurun waktu Januari hingga pertengahan Desember 2016, Kementerian Kominfo mencatat peningkatan situs bohong terus terjadi.

Selain kabar-kabar bohong, ditemukan juga peningkatan jumlah konten bermuatan SARA, provokasi, dan ujaran kebencian. Tak hanya melalui situs web, penyebaran hoaks juga kerap terjadi lewat akun media sosial. Hal ini tentunya dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak kecil.

Kemunculan internet juga semakin memperparah sirkulasi hoaks di dunia. Sama seperti meme, keberadaannya sangat mudah menyebar lewat media-media sosial. Apalagi biasanya konten hoaks

memiliki isu yang tengah ramai di masyarakat dan menghebohkan, yang membuatnya sangat mudah memancing orang untuk membagikannya.

Ditambah lagi, dengan kemunculan media abal-abal yang sama sekali tak menerapkan kaidah jurnalistik. Peran media profesional yang seharusnya membawa kecerahan dalam sebuah persoalan yang simpang siur di tengah masyarakat, semakin lama semakin tergerus.

Dari data yang dihimpun melalui Direktorat Pengendalian Konten Internet Ditjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo, pada rentang waktu tersebut, tercatat sudah 773.097 situs negatif yang diblokir melalui Trust Postif. Sebagian besar yang diblokir merupakan situs pornografi, sekitar 90 persen atau 767.888 situs. Sementara konten perjudian, termasuk situs kedua paling banyak diblokir dengan jumlah 3.755. Sedangkan jumlah situs radikalisme yang diblokir sebanyak 87, sementara konten SARA tak lebih dari 51 situs.

Halau Konten Negatif dengan Mesin AIS

Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2014-2019, Rudiantara pernah mengungkapkan bahwa hoaks dan media sosial seperti *vicious circle*, atau lingkaran setan. Dari situ, langkah pencegahan mulai gencar dilakukan oleh Kominfo melalui langkah-langkah pencegahan agar tidak membahayakan pesta demokrasi itu, salah satunya dengan menyiapkan mesin AIS, sebuah alat pengais konten negatif di Internet besutan Direktorat Pengendalian Konten Internet Ditjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo.

Mesin pengais konten negatif Kominfo (Mesin AIS) mulai resmi difungsikan pada sejak awal tahun 2018. Sejalan dengan hal tersebut, tim Trust Positif (Trust+) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dilebur dalam Tim Cyber Drone 9.

“Selama ini, tim Trust Positif yang menangani laporan masyarakat tentang konten-konten negatif di ranah maya. Kendati begitu, prosedur dan mekanisme dari Trust+ tetap dipertahankan, bahkan dikembangkan lebih lanjut ke tempat dan sistem anyar yang dinamai “Cyber Drone 9” (CD9). Semua squad Trust+ bergabung di Cyber Drone 9,” kata Kasubdit Penyidikan dan Penindakan Kominfo, Teguh Arifiyadhi yang saat ini menjabat sebagai Plt. Direktur Pengendalian Konten Internet Ditjen Aptika, dari Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu (05/01/2018).

Jika mendengar nama Cyber Drone 9, mungkin kebanyakan orang terbayang akan sebuah pesawat terbang nirawak yang melakukan pemantauan atau



Teguh Arifiyadhi
Plt. Direktur Pengendalian Konten Internet Ditjen Aptika 2020.

Hoaks dan media sosial seperti *vicious circle*, atau lingkaran setan.

surveillance. Padahal, bukan demikian wujudnya. Cyber Drone 9 adalah sistem baru milik Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengganti sistem pemblokiran konten negatif yang telah ada sebelumnya, yakni Trust+ yang secara *de facto* di bubarkan. Kominfo mengoperasikan mesin pengais (*crawling*) konten negatif ini sebagai langkah untuk menghalau konten-konten negatif di internet.

Menurut Teguh, Cyber Drone 9 akan membantu mempercepat cara kerja melawan konten negatif. Apalagi dengan tambahan kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI), cara kerja mesin sensor internet ini akan serba otomatis.

“Secara ideal melakukan penapisan bisa dimulai dari IP *filtering*, *hosting*, URL ataupun dari kontennya. Untuk melakukan itu semua, maka

dari itu kami harus memilih yang mana melanggar aturan,” kata Teguh. Lebih lanjut, Teguh juga menyampaikan bahwa Cyber Drone akan membantu kami *men-supply* informasi tentang ribuan bahkan puluhan ribu situs serta akun penyebar konten negatif seperti pornografi, perjudian, penipuan, persekusi, hoaks, dan ideologi radikal, dalam waktu relatif cepat.

Lokasinya yang terselubung dan sulit diakses sembarang orang mungkin cukup menggambarkan keberadaan ruang pengoperasian Mesin AIS. Alat ini dimanfaatkan betul oleh Kominfo guna keberlangsungan Pemilu 2019 lalu berjalan lancar. Konten-konten yang berkaitan dengan hoaks dan isu-isu yang dibicarakan ketika itu, juga tak luput dari pemantauan alat ini.

Cyber Drone membantu men-supply informasi tentang ribuan, bahkan puluhan ribu situs serta akun penyebar konten negatif seperti pornografi, perjudian, penipuan, persekusi, hoaks, dan ideologi radikal, dalam waktu relatif cepat.



Cara Kerja Mesin AIS

Selanjutnya, bagi yang ingin tahu bagaimana cara kerja mesin ini, dilakukan seperti proses penyortiran. Dengan memasukkan kata kunci tertentu, mesin AIS hanya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit untuk menemukan situs dan akun media sosial penyebar konten negatif.

Potensi viral-nya konten negatif tersebut juga dapat teridentifikasi. Tim Cyber Drone 9 mengimbau masyarakat tak perlu khawatir soal privasi atau kemungkinan internet di Indonesia bakal penuh sensor. Mereka menjamin tim Cyber Drone 9 tak akan digunakan pemerintah untuk mengawasi semua pengguna internet dan media sosial. Mesin



AIS di Cyber Drone 9 hanya untuk mempercepat proses *crawling* konten negatif yang awalnya dilakukan secara manual.

Mesin AIS juga tak dibekali "senjata pembunuh" situs, akun media sosial, portal berita, dan lainnya. Hasil temuan dari mesin ini selanjutnya akan diverifikasi ulang oleh tim verifikator yang terpilih dan terlatih oleh Kominfo. Lalu, setelah menemukenali beragam bukti nyata dari unggahan konten negatif, maka akan di-*screenshot* untuk kemudian diteruskan ke tim eksekutor guna pengambilan tindakan terakhir.

Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, mesin ini bekerja secara efektif dalam mengidentifikasi konten negatif. Dikatakan konten negatif bisa dilihat dari seberapa besar pengaruh (*impact*) dan tingkat keviralnya dalam dunia siber.

"Sekali mengais, mesin ini dapat memberikan hasil berupa URL atau tautan yang bisa jutaan dan langsung mengklasifikasi. Secara kerja, mesin ini akan lebih efektif dan efisien dari segi waktu dan volume untuk menyaring konten negatif," kata Semuel sebagaimana yang tertera di laman kominfo.go.id, Jakarta, Jumat (05/01/2018).

Tentang keunggulan mesin ini, dijelaskan Dirjen Aptika, dalam satu kali perayapan (*crawling*) selama 5-10 menit saja, bisa menghasilkan jutaan konten yang kemudian diperkecil lagi berdasarkan jumlah kunjungan dan potensi keviralan konten tersebut. Dalam pengujian itu, mesin bernama AIS ini berhasil menemukan 120 ribu situs porno dari 1,2 juta situs terayap di Indonesia hanya dalam 3 hari.



“Padahal selama beberapa tahun ini pemerintah hanya sanggup menepis 700 ribu situs terlarang itu,” terangnya.

Dikatakan Samuel, mesin ini akan bekerja, apabila menemukan konten negatif atau yang melanggar aturan, tim verifikator akan menandai kiriman tersebut (*screen-capture*) lalu diserahkan ke tim eksekutor untuk ditindaklanjuti. Dalam jangkauannya, hingga saat ini pihak Kominfo sudah bekerjasama dengan sejumlah layanan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, BBM, Line, Bigo, dan Google.

“Namun berbeda, jika konten negatif tersebut terpasang pada sebuah portal berita, maka sesuai UU Pers pihak pemilik portal memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi beritanya terlebih dahulu,” tambahnya.

Sebagai informasi, mesin AIS tidak hanya digunakan oleh Kominfo, tetapi juga bisa dimanfaatkan sejumlah instansi terkait lain seperti BNPT untuk melacak aktivitas terorisme, OJK untuk kegiatan investasi bodong, melacak aktivitas narkoba oleh BNN, dan aktivitas perdagangan obat-obat ilegal oleh BPOM, Kepolisian, dan pihak mana saja yang diberi mandat menjaga kesatuan negara.

Total Temuan isu Hoaks

Jika berbicara lebih jauh mengenai hoaks, sejarah mencatat bahwa hoaks bukanlah hal baru, banyak ragamnya, dalam dunia sains, dunia militer bahkan dalam urusan agama sekalipun. Mulai dari hoaks serius yang mempertaruhkan dan bahkan mengorbankan nyawa hingga hoaks sepele yang sekedar menggelikan para pembaca atau pendengar sebuah cerita. Anehnya hoaks yang menggelikan juga bisa memicu kerusuhan dan peperangan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, penyebaran berita hoaks bisa melaju lebih cepat daripada anak panah yang melesat meninggalkan busurnya, hanya tinggal sekali tekan, kabar bohong bisa tersebar pada seluruh anggota grup Whatsapp. Apalagi di tengah maraknya wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) seperti saat ini, fenomena hoaks pun masih mendistorsi dunia maya sehingga terjadi kesimpangsiuran informasi terkait virus tersebut dan menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat.

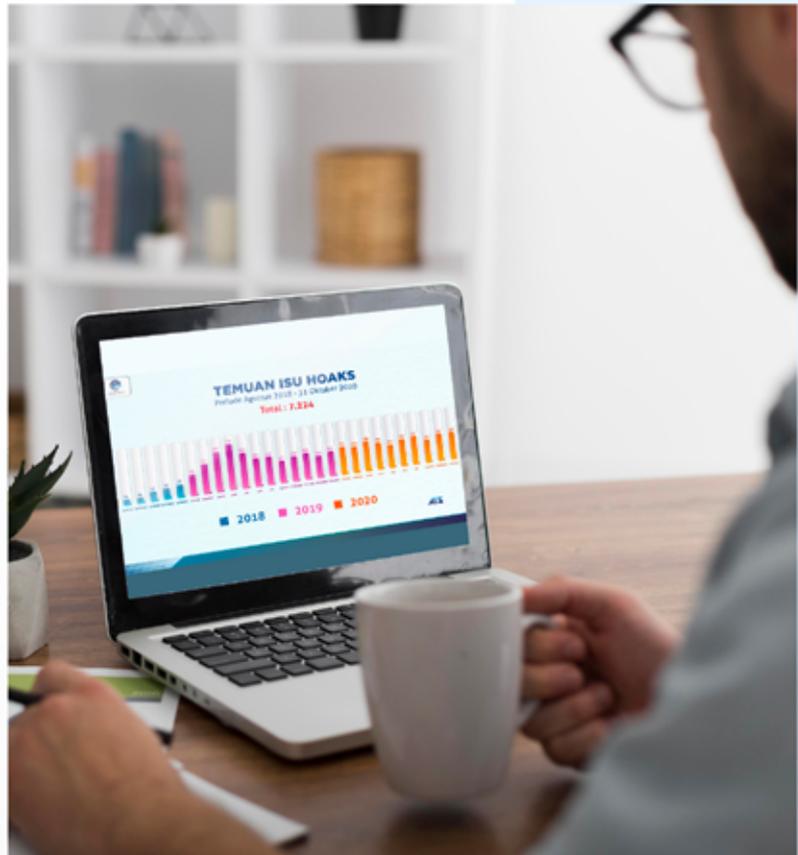
Oleh karena itu, guna meningkatkan literasi masyarakat terhadap COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Kominfo berupaya menyapu bersih seluruh hoaks yang ada di dunia maya, khususnya di media sosial.

Berdasarkan data dari Kementerian Kominfo, tercatat, sebanyak 7.224 temuan hoaks yang ditemukan sepanjang periode Agustus 2018 hingga 31 Oktober 2020. Selama tahun 2019, jumlah konten hoaks terbanyak ditemukan pada bulan April 2019 yakni sebanyak 501 konten. Dari hasil pemantauan konten internet dan media sosial yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Konten Internet Ditjen Aptika Kominfo, selama rentan waktu Agustus 2018 hingga 31 Oktober 2020, jumlah isu hoaks atau disinformasi yang berkaitan dengan politik ditemukan sebanyak 1.186 konten. Sementara untuk hoaks atau disinformasi yang berkaitan dengan pemerintahan sebanyak 1.430 konten. Adapun isu kesehatan ditemukan sebanyak 1.397 konten, termasuk diantaranya yang berkaitan dengan isu mengenai Virus Corona baru-baru ini.

Mengenai isu kejahatan ditemukan 475 konten. Adapun isu yang berkaitan dengan fitnah sebanyak 377 konten, dan untuk isu hoaks mengenai internasional terdapat 437 konten. Soal hoaks bencana alam berjumlah 302 konten. Hoaks yang berkaitan dengan penipuan sebanyak 459 konten ditemukan. Selebihnya berkaitan dengan mitos 212 konten, perdagangan 49 konten, pendidikan 47 konten, agama 277 konten, serta lainnya 576 konten.

Meski jumlahnya tak seberapa dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia dengan total penduduk sekitar 262 juta jiwa, namun kecepatan sebaran informasi banyak bermunculan di media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube dan Twitter, bisa memengaruhi banyak orang dalam sekejap. Apalagi, setiap orang memiliki perbedaan dalam kemampuan untuk memilah dan memilih informasi. Membedakan mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan.

Bukan tanpa alasan, hoaks mengenai COVID-19 muncul. Dibaliknya, selalu ada kepentingan pembuatnya. "Mulai dari



kepentingan ekonomi, politik, bahkan sampai dengan kepentingan untuk mengacaukan atau memecah belah kehidupan berbangsa," tutur Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Hukum, Henri Subiakto dalam beberapa kesempatan diskusi dan seminar mengenai hoaks.

Tak Cukup Klarifikasi

Kementerian Kominfo berupaya proaktif dalam mengklarifikasi konten hoaks yang tersebar di media sosial. Oleh karena itu, meski dalam masa adaptasi kebiasaan baru, Tim AIS Direktorat Pengendalian Konten Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo terus bekerja keras untuk mengidentifikasi dan menyusun klarifikasi atas hoaks yang beredar di masyarakat.

Bahkan, Menteri Kominfo Johnny G. Plate telah melakukan langkah-langkah strategis untuk meredam dan mencegah penyebaran hoaks, termasuk

diantaranya berkoordinasi dengan Kepolisian RI guna melakukan penindakan tegas kepada pembuat serta penyebar kabar bohong mengenai pandemi COVID-19.

"Tentunya tindakan para penyebar hoaks ini telah melanggar Undang-undang ITE, tepatnya pasal 27 dan 28. Ancaman hukuman pidana dan sanksi berupa denda untuk produsen dan penyebarannya tercantum di sana," tutur Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta beberapa waktu lalu.

Oleh sebab itu, dalam mencegah penyebaran berita hoaks, pemerintah khususnya Kominfo telah menerapkan beberapa langkah. Pertama, yakni melakukan edukasi kepada masyarakat dengan menggandeng berbagai pihak seperti perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hingga komunitas.



Jaga Ruang Digital Bersih

Lebih lanjut, berkaitan dengan ruang digital, Menteri Johnny mengatakan ruang digital bisa menimbulkan bahaya sehingga hal-hal kotor yang berada di dalamnya perlu dibersihkan. Oleh karena itu, ia menyebut pihaknya tengah gencar memberantas hoaks di berbagai platform digital.

Dijelaskan Menteri Johnny, pembersihan ruang digital dilakukan agar tidak berpotensi menimbulkan kegaduhan di era post-truth seperti saat ini. Apalagi, informasi hoaks yang berseliweran, kerap mengandung ujaran kebencian, misinformasi, maupun malinformasi. Hal tersebut perlu ditindak secara tegas agar tak menimbulkan permusuhan.

“Kementerian Kominfo ditugaskan oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk memastikan ruang digital bersih. Namun, jangan dihadapkan dengan demokrasi, seolah-olah Kominfo antidemokrasi,” ujarnya ketika menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional X Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang dihelat secara daring, dari Jakarta, Senin (23/11/2020)

Lebih lanjut, Johnny menyatakan demokrasi tidak dapat bertumbuh bila ruang digital beroperasi secara tidak sehat. Sesuai amanat UU ITE, Kominfo memiliki tugas untuk memastikan ruang digital menjadi bersih.

“Sehingga kalau ditanya apa tugas Kominfo? Membersihkan ruang digital, memberikan label hoaks dan bukan hoaks, memberikan label disinformasi dan malinformasi, memberikan label ujaran kebencian atau bukan, dan semua ruang-ruang yang negatif diberi label,” jelasnya.

Selain itu, Johnny juga menegaskan ruang digital harus dijaga dari hal-hal negatif lainnya, seperti pornografi, perdagangan seks, dan perdagangan narkoba.

Jaga Kualitas Demokrasi

Demokrasi yang sehat hanya tumbuh berkembang di ruang digital yang terang benderang dan sehat. Namun *post truth*, disinformasi, hoaks, *hate speech*, apabila dibiarkan maka itu hanya mendorong demokrasi dalam kegelapan.

“Indonesia membutuhkan demokrasi yang cemerlang dan terang-benderang, karenanya Indonesia secara kolaboratif ekosistemnya untuk menjaga agar ruang digital kita senantiasa bersih,” tuturnya.

Dalam diskusi tersebut, Menteri Johnny menegaskan posisi Indonesia saat ini berada di *point of no return* dalam hal ekspresi pendapat, kebebasan pers, dan demokrasi. Sehingga sudah tidak bisa kembali lagi ke era otoritarian karena pemerintah sudah berada pada titik yang hanya dapat melihat ke depan.

“Kita melihat ke depan bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi kita, meningkatkan ekspresi demokrasi yang bertanggung jawab, meningkatkan kebebasan persnya bermanfaat dan semua ini tata kelolanya berada di luar pemerintah. Namun, tugas yang

diberikan kepada pemerintah adalah memastikan demokrasi berjalan dengan baik,” paparnya.

Saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat agar lebih bertanggung jawab. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas kebebasan pers agar lebih bermanfaat.

Selain itu, Menteri Johnny mengatakan ada banyak lembaga quasi (*the quasi government*) yang dibentuk di era reformasi, untuk memastikan agar demokrasi tidak berjalan mundur sehingga menjadi otoritarian lagi.

“Bila dulu kebebasan pers ada di bawah Departemen Penerangan, saat ini sudah ada Dewan Pers. Penyiaran sudah ada Komisi Penyiaran, dan seterusnya, yang sudah dikelola tidak lagi langsung oleh lembaga atau kementerian,” urai Johnny.

Setiap hari, melalui laman resmi kominfo.go.id, laporan isu hoaks bisa diakses oleh masyarakat melalui <https://kominfo.go.id/inihoaks>. Ada cukup banyak ragam hoaks mengenai COVID-19 dan sebagainya. Misalnya, hoaks tentang skenario krisis ekonomi di Indonesia, informasi tentang obat-obatan penangkal virus corona, tentang cara pencegahan virus corona, cara penularan virus corona, tentang beberapa kepala Negara/warga yang melakukan pertaubatan akibat adanya virus ini, paket internet gratis, bahkan sampai dengan rakyat Indonesia akan dibunuh vaksin.

Sebagai warga negara yang baik, setiap orang harus bisa memilah dan tidak mengonsumsi informasi hoaks. Pasalnya, hoaks bukan hanya masalah pemerintah semata, melainkan juga akan berdampak ke masyarakat dan elemen yang ada di negeri ini. (hm.ys)

Mekanisme Penanganan Hoaks oleh Tim AIS Kominfo



Perkembangan teknologi informasi berikut kegunaannya tidak saja menyoal manfaat baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran beragam platform teknologi terkadang disalahgunakan baik oleh perseorangan maupun atas nama kelompok dengan tujuannya yang tidak jelas. Padahal, banyak sekali dampak positif yang diperoleh jika teknologi dimanfaatkan dengan baik.

Menyadari pentingnya memanfaatkan ruang digital sebaik mungkin, semua orang dituntut untuk menjadi edukator kepada orang lain. Karena ekosistem digital merupakan suatu era baru di mana aktifitas fisik sangat terbantu dengan hadirnya teknologi. Sebagaimana termaktub dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam salah satu alineanya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di masa serba dinamis ini, kebutuhan, pemahaman dan pemanfaatan teknologi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjalankan fungsi sebagai *Government Public Relation* (GPR) diberikan mandat dalam menjaga ruang digital yang sehat, mencegah berbagai bentuk informasi yang bermuara pada hoaks, disinformasi, ujaran kebencian terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar golongan tertentu hingga konten-konten yang berhubungan dengan pornografi, perjudian serta berbagai konten negatif lainnya.

Guna menjaga ruang digital yang sehat sebagaimana yang kita inginkan bersama, Kementerian Kominfo melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika pada tahun 2018 lalu memperkenalkan mesin AIS yang menggunakan *artificial intelligence* (AI).

Mesin pelacak konten atau yang dikenal dengan mesin *crawling* itu dikelola oleh Tim AIS Kementerian Kominfo yang bekerja selama 24 jam non stop, 7 hari 7 malam setiap harinya. Lantas, bagaimana mekanisme kerja Tim AIS dalam menangani konten-konten negatif di ruang digital atau media sosial mulai dari penanganan hingga penindakan?

Kepala Seksi Pemblokiran Konten Internet Ilegal, Taruli, pada Februari 2020 lalu memaparkan cara kerja Tim AIS dalam menangani konten negatif di ruang digital.

Laporan Aduan Konten

Laporan Aduan Konten merupakan tahap pertama kerja Tim AIS dalam penanganan konten internet negatif. Tim AIS sebelumnya menerima laporan dari masyarakat dan instansi terkait jika ditemukan ada konten-konten yang mengarah pada informasi hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, SARA hingga konten pornografi, perjudian, radikalisme, terorisme dan lain-lain.

Salah satu hasil laporan yang diterima Tim AIS berasal dari situs aduankonten.id. Situs ini merupakan fasilitas pengaduan konten negatif seperti situs/website, URL, akun media sosial, aplikasi mobile dan software. Jika ditemukan konten yang memenuhi kriteria sebagai informasi dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan negatif, maka dilakukan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyampaikan aduan konten negatif, setiap pelapor dapat mendaftarkan diri, mengunggah tautan atau link konten yang diduga sebagai konten negatif, kemudian screenshot situs atau konten tersebut disertai dengan alasan.

Analisis Isu

Setelah menerima laporan dari masyarakat atau instansi terkait, Tim AIS kemudian melakukan kajian secara ketat dan mendalam guna memastikan apakah konten tersebut mengandung unsur negatif seperti informasi hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, SARA hingga konten pornografi, perjudian, radikalisme, terorisme dan lain-lain.

Dalam arti lain, Tim AIS melakukan *learning by doing* untuk kemudian dilakukan analisis isu secara cermat. Sebagai contoh, dalam pemantauan media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram Tim AIS hanya menemukan data akun yang bersifat

publik untuk dilakukan penelusuran, sedangkan akun *private* tidak bisa. Oleh karena itu, analisis isu menjadi salah satu tahapan penting sebelum melakukan tahapan penindakan selanjutnya.

Tahap Pemblokiran

Tahapan pemblokiran dilakukan setelah analisis isu dan kajian yang mendalam dilakukan, jika ditemukan konten negatif maka Tim AIS langsung melakukan pemblokiran terhadap situs/website, URL, akun media sosial, aplikasi *mobile* dan *software*.



Laporan dari masyarakat atau instansi terkait dikaji secara ketat dan mendalam guna memastikan apakah konten tersebut mengandung unsur negatif seperti hoaks, ujaran kebencian, hingga konten pornografi, perjudian, radikalisme dan terorisme.

Tahapan pemblokiran merupakan tahap penindakan awal setelah konten yang ditelusuri telah melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain dilakukan pemblokiran, Tim AIS juga melakukan pembatasan akses internet dan media sosial.

Dalam kaitannya dengan tahapan ini, Tim AIS juga menghasilkan laporan harian isu trending media sosial, analisa isu populer dan analisa tagar. Setiap harinya, Tim AIS menemukan puluhan bahkan hingga ratusan konten negatif seperti hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, SARA hingga konten pornografi, perjudian, radikalisme, terorisme dan lain-lain.

Stempel Hoaks

Tahapan stempel hoaks merupakan alur informasi kepada masyarakat bahwa aduan konten yang diterima Tim AIS merupakan konten negatif dan telah melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konten yang dinyatakan berunsur negatif diberikan stempel berwarna merah dengan tulisan Hoaks/Disinformasi dengan melampirkan logo Kementerian Kominfo sebagai bukti bahwa informasi atas konten tersebut resmi atas nama pemerintah. Selanjutnya, hasil penelusuran tersebut dibuat laporan harian dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Untuk mengakses isu hoaks harian juga dapat melalui website resmi kominfo yang bisa diakses melalui tautan kominfo.fo/inihoaks.

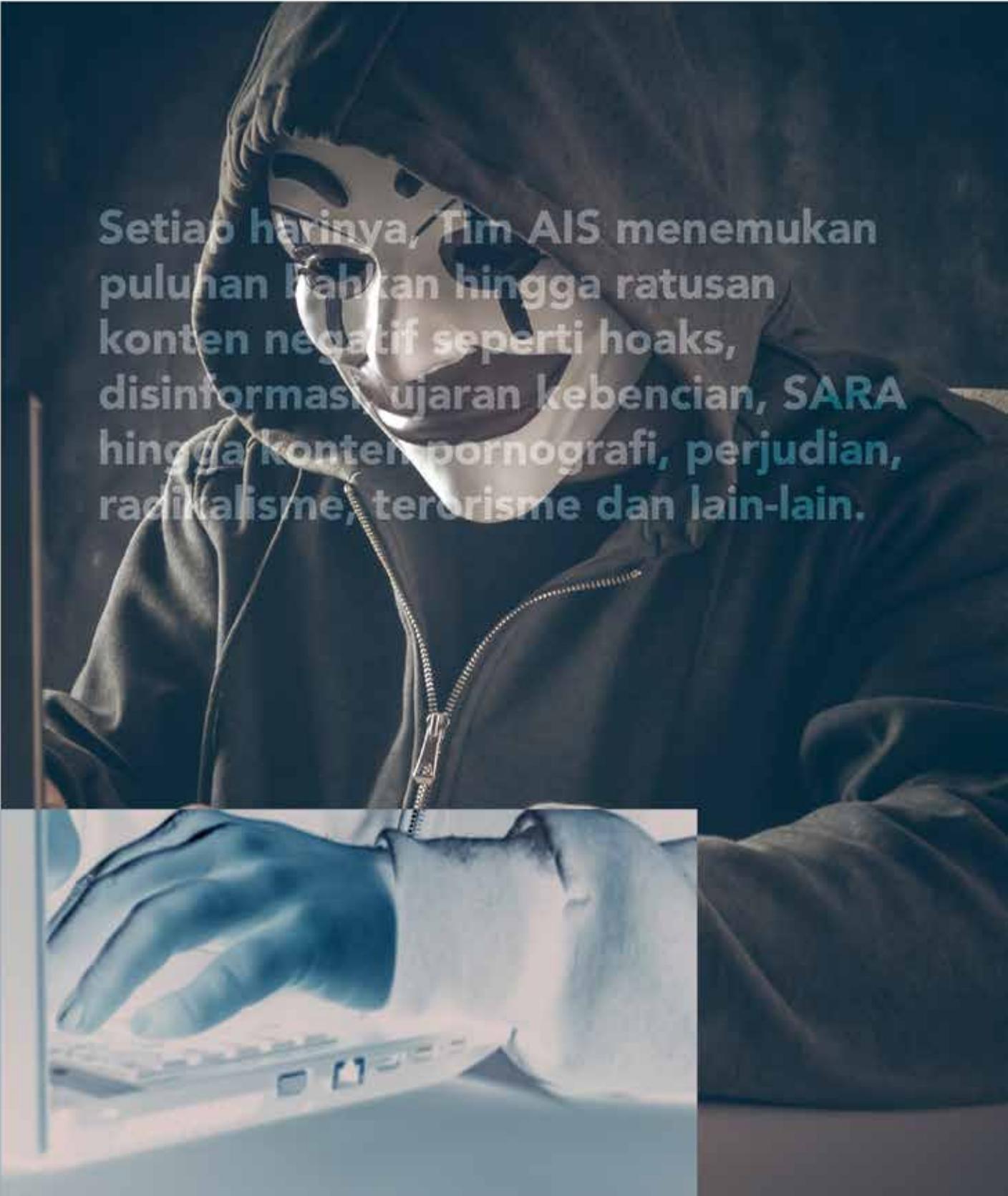
Tim AIS Kementerian Kominfo terus bekerja keras setiap harinya selama 24 jam non stop untuk memastikan ruang digital tidak diisi dengan berbagai konten negatif. Sebagai

contoh, maraknya hoaks dan disinformasi terkait dengan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih bertebaran di jagat maya. Oleh karena itu, penanganan konten negatif tidak saja menjadi fokus pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi dan kesadaran bersama seluruh elemen masyarakat agar secara bersama-sama menjaga ruang digital yang sehat dan bermanfaat. Di tengah maraknya sebaran hoaks dan disinformasi, hal terpenting yang juga perlu diperhatikan adalah meningkatkan budaya literasi agar kita tidak terjebak dalam pusaran informasi yang tidak benar.

Berdasarkan laporan isu hoaks harian tentang Corona Virus oleh Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah isu hoaks Corona Virus per 29 November 2020 berjumlah 1.249 sejak mencuatnya informasi pandemi pada awal tahun lalu.

Secara keseluruhan, temuan isu hoaks oleh Tim AIS Kementerian Kominfo periode Agustus 2018 sampai 31 Oktober 2020 total sebanyak 7.224 dengan rincian masing-masing kategori antara lain kategori pemerintahan 1.430, kesehatan 1.397, politik 1.186, lain-lain 576, kejahatan 475, penipuan 459, internasional 437, fitnah 377, bencana alam 302, agama 277, mitos 212, perdagangan 49 dan pendidikan 47 hoaks.

Melalui pengendalian konten negatif oleh Tim AIS Kementerian Kominfo diharapkan partisipasi masyarakat lebih ditingkatkan untuk terus memberikan laporan aduan agar tercipta ruang digital yang sehat.



Setiap harinya, Tim AIS menemukan puluhan bahkan hingga ratusan konten negatif seperti hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, SARA hingga konten pornografi, perjudian, radikalisme, terorisme dan lain-lain.

Sumber Foto : Unsplash | Bermix Studio

Penanganan Hoaks dalam Angka



sumber infografis : Ais

Hoax of The Year

10 Hoaks Paling Viral Tahun 2020

*data per 15 November 2020

*data berdasarkan hoaks yang paling banyak dibaca melalui mesin pencarian



1. Pesan Berantai Teresa Fidalgo

Kembali beredar sebuah pesan berantai di sosial media berisi permintaan Teresa Fidalgo; seorang wanita yang meninggal di usia 27 tahun dengan pesan meminta orang yang menerima pesan darinya untuk mengirimnya kembali ke 20 orang lain. Jika tidak akan mendapat kemalangan.

"Saya Teresa Fidalgo dan jika Anda tidak memposting ini di 20 foto lain, saya akan tidur dengan Anda selamanya, Seorang gadis diabaikan dan ibunya meninggal 29 hari kemudian. Anda bahkan dapat mencari saya di Google."

Faktanya cerita asli pada pesan berantai tersebut adalah karangan dari seorang produser berkebangsaan Portugal, David Rebordão, dalam film garapannya berjudul "Curva".

2. Manfaat Bawang Merah Dapat Menyerap Virus

Pageviews: 103570

Telah beredar di beberapa media sosial bahwa bawang merah dapat menyerap virus. Tidak sedikit pengguna sosial Facebook memberitakan kabar atau berita yang benar, namun banyak juga pengguna media sosial yang menyebarkan berita bohong atau Hoaks terutama menyangkut kesehatan. Sumber informasi yang disebarkan juga terkadang tidak jelas dan juga terkadang mitos.

Hal ini berkaitan dengan penyebaran informasi irisan bawang merah bisa mengikat virus di ruangan. Informasi tersebut hanyalah mitos seperti yang dijelaskan oleh salah satu sumber National Onion Association (NOA). Sebuah organisasi yang mewakili petani, pedagang, eksporter, dan importer bawang merah di Amerika Serikat yang ada sejak 1913.

Dalam sebuah artikelnya, situs tersebut menjelaskan bahwa bawang merah mentah yang dipotong dan diletakkan di ruangan, kemudian bisa menyerap kuman dan racun, hanyalah mitos. "Tak ada bukti ilmiah bahwa bawang merah mentah yang dipotong bisa menyerap kuman atau meredakan udara dari racun," tulis artikel tersebut. Menurut tulisan itu, mitos tersebut memang sudah melegenda dan tersebar di seantero dunia.



3. [HOAKS] Literasi COVID-19 dari Pakar Virus Dr. Moh. Indro Cahyono

Pageviews: 48319

Telah beredar pesan berantai di WhatsApp yang berisi tulisan mengenai literasi COVID-19 yang mengatasnamakan seorang Pakar Virus bernama Dr. Moh. Indro Cahyono. Dalam pesan tersebut berisi tentang proses penyebaran virus hingga penjelasan mengenai kemungkinan pasien positif untuk kembali terinfeksi Virus Corona.

Faktanya, informasi dalam pesan berantai tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari suara.com, Moh. Indro Cahyono menyebut bahwa informasi tersebut hoaks, bukan ia yang membuat dan menyebarkan. Beliau mengatakan bahwa pesan ini seolah-olah memberikan pesan positif padahal isinya sangat menyesatkan. Beliau juga mengatakan bahwa ini bukan kali pertama ada pihak yang menggunakan namanya untuk menyebarkan hoaks.



4. [HOAKS] Data Tol yang Ditutup Arah DKI Jakarta

Pageviews: 46919



Beredar sebuah data informasi di media sosial Whatsapp yang menyebutkan adanya penutupan sejumlah gerbang tol menuju Jakarta, di antaranya: arah Tangerang ke Jakarta, arah Depok Bogor ke Jakarta, arah Bekasi Ke Jakarta.

Faktanya, hal tersebut dibantah oleh Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga, Dwimawan Heru. Ia mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Hingga saat ini ruas jalan tol wilayah Jabotabek yang dioperasikan Jasa Marga Group, diantaranya Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Tol Jakarta-Tangerang, Jalan Tol Dalam Kota Jakarta, Jalan Tol Sedyatmo (Bandara), Jalan Tol Jagorawi dan Jalan Tol JORR non-S masih beroperasi dengan normal. Selain itu, ditegaskan juga oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo, ia mengatakan bahwa informasi tersebut Hoaks.

5. [HOAKS] Galeri Pemenang Undian Lazada

👁 Pageviews: 42914

Beredar sebuah informasi pemenang undian Lazada yang cukup membuat keresahan dikalangan masyarakat. Informasi undian tersebut bernarasi: "Disampaikan Kepada Saudara(i) yang beruntung mendapatkan Pesan Atau Informasi Undian LAZADA disertai CODE PIN PEMENANG, dan mencantumkan alamat Situs Resmi LAZADA yang tertera di bawah ini: www.lazada2019.cf Berarti SAH selaku pemenang hadiah langsung dari LAZADA. SELAMAT !!! Kepada Pemenang Undian GEBYAR LAZADA, Silahkan Anda Cocokkan KODE PIN PEMENANG Yang Anda Terimah melalui VIA SMS atau Pesan Singkat Dari LAZADA Dengan Hadiah Yang Tertera Di Bawah ini"

Faktanya informasi undian Lazada tersebut adalah kabar bohong yang bertujuan untuk mengelabui masyarakat. Salah satunya adalah alamat situs yang tertulis adalah <http://www.lazada2019.cf/>. Sementara situs resmi milik Lazada beralamatkan <https://www.lazada.co.id>. Selain itu terdapat foto laki-laki yang diklaim sebagai Marketing Office bernama Drs. Agus Susilo M.si. Faktanya foto tersebut adalah foto Darwin Silalahi yang merupakan CEO Shell Indonesia.

Melansir dari kabartangsel.com belakangan diketahui bahwa apa yang terdapat di dalam situs dan pesan berantai tersebut adalah tidak benar. Melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono ditegaskan bahwa apa yang tersebar di kalangan masyarakat mengenai Galeri Pemenang Undian Lazada adalah palsu.

6. [HOAKS] Jutaan Rokok Sampoerna Terpapar COVID-19

👁 Pageviews: 33172

Telah beredar postingan di media sosial yang menyebutkan bahwa terdapat jutaan rokok Sampoerna yang terpapar COVID-19 beredar luas di masyarakat.

Faktanya, informasi dalam postingan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, klaim jutaan rokok Sampoerna terpapar COVID-19 beredar di masyarakat tidak terbukti. Sampoerna telah melakukan karantina produk selama lima hari sebelum akhirnya didistribusikan untuk mencegah penyebaran COVID-19.



7. [HOAKS] Pesan Berantai Berisi Pencegahan Virus Corona yang Mengatasnamakan UNICEF

Pageviews: 31760

Beredar pesan berantai mengatasnamakan UNICEF (United Nations International Children Education Fund) yang kemudian disebarakan di media sosial terkait tips pencegahan Virus Corona.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Cek Fakta Liputan6.com ditemukan adanya artikel yang membantah kebenaran pesan berantai tersebut, salah satunya adalah thequint.com dengan judul artikel "Message on Coronavirus (COVID-19) Neither From UNICEF Nor Accurate". Dalam artikel itu dijelaskan bahwa pesan berantai yang tersebar bukan berasal dari UNICEF, melainkan diduga berasal dari sumber yang tidak terverifikasi. Adapun pedoman pencegahan COVID-19 yang dikeluarkan UNICEF diunggah pada situs resmi UNICEF, unicef.org dengan judul "Coronavirus disease (COVID-19): What parents should know".



8. [HOAKS] Penyembuhan Virus Corona dengan Bawang Putih

Pageviews: 31250



Beredar sebuah informasi di media sosial berupa tata cara pengolahan bawang putih yang diklaim dapat menyembuhkan korban yang terinfeksi virus corona.

Faktanya menurut Ahli vaksin dari OMNI Hospitals Pulomas, dr Dirga Sakti Rambe, Sp.PD mengatakan klaim bawang putih dapat menyembuhkan virus corona bisa dipastikan tidak benar alias hoaks. Menurutnya hingga saat ini belum ada obat atau vaksin yang teruji bisa menghalau virus. Ditegaskan juga oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan dr. Wiendra Waworuntu bahwa belum ada vaksin maupun obat untuk virus corona strain baru ini.

9. [HOAKS] Bahaya Sinar Kosmik yang Melewati Bumi Malam Hari

👁 Pageviews: 29546

Telah beredar pesan berantai di media sosial terkait bahayanya sinar kosmik yang akan melewati bumi. dipesan tersebut juga dijelaskan bahwa sinar ini akan lewat pukul 00.30-03.30. warga diminta untuk menutup dan menjauhkan HP, laptop, tablet dan lain-lain agar terhindar dari radiasi barang tersebut. Hal ini juga sudah dilakukan di Singapura terkait pengumuman informasi ini.

Faktanya adalah pesan berantai ini ternyata sudah pernah beredar di media sosial beberapa tahun lalu, dan isinya hampir sama, namun tidak dicantumkan dengan jelas kapan tanggal bulan dan tahunnya. Menurut Kepala Pusat Sains Antariksa Lapan, Clara Y. Yatini, bumi pada umumnya terlindungi dari sinar kosmik karena adanya magnetosfer. Sedangkan magnetosfer sendiri merupakan lapisan medan magnet yang menyelubungi benda angkasa. Magnetosfer ini menjangkau ribuan kilometer ke antariksa. Fungsinya di antara lain melindungi bumi dari puncak badai matahari yang disebut bisa menghancurkan bumi, menahan radiasi dan membelokkan partikel-partikel bermuatan serta angin matahari yang dapat membahayakan aktivitas manusia.



10. Link "Pemerintah Berikan Internet Gratis"

👁 Pageviews: 23040



Beredar kabar internet gratis dari pemerintah yang tersebar luas di sejumlah media sosial. Disebutkan pemberian internet gratis tersebut sebagai insentif atas situasi pandemi Virus Corona yang telah mewabah di Indonesia. Unggahan dan pesan yang disebarakan disertai pula link yang berbeda-beda, tetapi dengan karakter URL yang hampir sama.

Setelah ditelusuri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Direktur Jenderal Pos dan Penyelenggaraan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo, Ahmad Ramli memastikan informasi dan link tersebut tidak benar alias hoaks. Ahmad Ramli mengimbau agar tidak percaya dengan kabar viral itu. Ia juga mengatakan program yang berasal dari pemerintah adalah berupa kerja sama dengan operator telekomunikasi dengan memberikan layanan internet gratis melalui platform dunia pendidikan.



10 Isu Hoaks Terpopuler Versi Kominfo 2020

1 Presiden Jokowi Positif Virus Corona

[DISINFORMASI]

Penjelasan :

Telah beredar tangkapan layar dari sebuah artikel berita media daring yang berjudul "Hasil Pemeriksaan Presiden Jokowi Positif Virus Corona". Artikel tersebut dimuat pada tanggal 15 Maret 2020, Pukul 15:05 WIB.

Setelah ditelusuri, tangkapan layar tersebut adalah hasil suntingan dari artikel yang dimuat oleh Detik.com pada tanggal 15 Maret 2020, Pukul 15:05 WIB dengan judul asli dari artikel tersebut adalah "Presiden Jokowi Jalani Tes Virus Corona Sore Ini".

2 COVID-19 Bisa Disembuhkan dengan Minyak Kayu Putih

[DISINFORMASI]

Penjelasan :

Baru-baru ini warganet kembali dihebohkan dengan kabar yang menyebutkan COVID-19 bisa disembuhkan dengan minyak kayu putih. Informasi tersebut bermula dari beredarnya video mantan pasien COVID-19 yang menyebut COVID-19 dapat disembuhkan dengan minyak kayu putih.

Faktanya, dikutip dari cekfakta.tempo.co, klaim mantan pasien COVID-19 yang menyebut COVID-19 bisa disembuhkan dengan minyak kayu putih menyesatkan. Sejauh ini, penelitian menunjukkan bahwa Eucalyptus, tanaman yang menjadi bahan baku minyak kayu putih, memang efektif membunuh Virus Corona. Namun, penelitian itu tidak melibatkan Virus Corona penyebab COVID-19, SARS-CoV-2, melainkan virus Corona jenis lain. Dengan demikian, Eucalyptus belum bisa disebut sebagai obat COVID-19.

3 Pengukur Suhu Tubuh Thermo Gun Berbahaya Bagi Manusia

[DISINFORMASI]

Penjelasan:

Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan alat pengukur suhu tubuh Thermo Gun yang sekarang banyak digunakan di saat pandemi COVID-19 berbahaya bagi otak atau tubuh manusia, dikarenakan radiasi laser tersebut dapat merusak struktur otak. Pada nasarsi lain disebutkan pula bahwa Thermo Gun tersebut sebenarnya diperuntukan untuk mengukur suhu panas pada kabel dan bukan untuk manusia. Faktanya, klaim mengenai Thermo Gun atau Termometer Tembak berbahaya bagi tubuh adalah salah. Menurut Spesialis Penyakit Dalam, dr Ari Fahrial Syam SpPD-KGEH yang dilansir Cek Fakta Liputan6.com,

termometer yang digunakan di kening pada saat mengukur suhu tubuh tersebut aman digunakan dan telah lulus uji kesehatan. Penggunaan termometer inframerah juga tidak berdampak pada sistem saraf dan retina manusia, karena tidak memancarkan radiasi seperti sinar-X. Klaim bahwa Thermo Gun hanya diperuntukan untuk suhu panas kabel dan alat manufaktur tidak tepat, karena terdapat dua termometer yaitu Termometer Klinik atau yang diperuntukan untuk kepentingan medis dan Termometer Industri yang biasa digunakan untuk mengukur suhu benda atau

alat-alat manufaktur, seperti panas air, mesin, AC atau pendingin ruangan, kolam renang, trafo, dan lain-lain.



4 Klaim Aliansi Dokter Dunia soal COVID-19 [HOAKS]

Penjelasan :

Beredar di media sosial sebuah video mengatasnamakan Aliansi Dokter Dunia yang mengklaim bahwa Virus Corona adalah virus flu biasa dan tidak ada pandemi COVID-19. Dalam video tersebut mereka mengatakan lockdown di seluruh dunia untuk mencegah Virus Corona harus diakhiri.

Faktanya, klaim tersebut tidak tepat. Para ilmuwan secara umum menyatakan penyebab pandemi saat ini adalah Virus Corona baru SARS-CoV-2 dan bukan jenis virus influenza. Sejauh ini COVID-19 telah membunuh lebih banyak orang dibanding lima flu musiman jika korbannya digabungkan. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC)

AS, COVID-19 menyebar lebih mudah daripada flu dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih parah. Direktur Jenderal WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus menerangkan alasan COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi global, yakni tingkat penyebaran penyakit dan dampaknya yang sangat mengkhawatirkan. Juru Bicara Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito ikut angkat bicara menanggapi video ini. Prof Wiku menegaskan pernyataan dalam video tersebut tidak benar. Prof Wiku menekankan, masyarakat harus mampu memilah mana informasi yang benar. Sumber informasi terpercaya antara lain seperti WHO, PBB, dan CDC. Sedangkan untuk Indonesia, bisa bersumber dari Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19.

5 MUI Terbitkan Fatwa Haram Produk Prancis [DISINFORMASI]

Penjelasan:

Beredar sebuah narasi di sosial media Facebook yang menyebutkan MUI mengharamkan produk Prancis.

Setelah ditelusuri, klaim Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram produk Prancis adalah salah. Faktanya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) hanya menyerukan untuk memboikot produk-produk asal Prancis. Dikutip dari Medcom.id, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak umat Islam di Indonesia dan dunia memboikot semua produk Prancis. Pemboikotan ini dilakukan agar Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta maaf kepada umat Islam. Dilansir juga dari Kompas.com, seruan boikot MUI dilayangkan melalui surat pernyataan Nomor: Kep-1823/DP-MUI/X/2020 tertanggal 30 Oktober 2020.



6

Semua Pemilik Rekening BRI Mendapat Bantuan Sosial Corona Sebesar Rp600 Ribu [DISINFORMASI]

Penjelasan :

Kabar tentang semua pemilik rekening BRI mendapat bantuan sosial Corona sebesar Rp 600 ribu beredar luas di media sosial.

Faktanya, dikutip dari Liputan6.com, kabar tersebut tidak tepat. Bank BRI memang ditugaskan Kemensos untuk menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada para penerima. Corporate Secretary Bank BRI, Amam Sukriyanto menjelaskan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk bersama dengan Bank Himbara lainnya kembali ditunjuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 528.320 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak secara ekonomi akibat penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia. Tidak semua pemilik rekening BRI menjadi penerima BST. Nama penerima bantuan tersebut sudah ditetapkan oleh Kemensos RI.

Infografis Poin-poin RUU Cipta Kerja yang Disorot Buruh [DISINFORMASI]

Penjelasan :

Telah beredar gambar infografis di media sosial yang menunjukkan poin-poin RUU Cipta Kerja yang disorot buruh dan telah disahkan pada 5 Oktober 2020. Infografis tersebut diklaim bersumber dari kanal berita Merdeka.com.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, Merdeka.com telah mengklarifikasi bahwa infografis yang beredar merupakan infografis yang dipublish pada 18 Februari 2020 sebelum disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020. Poin-poin yang telah disahkan yang dianggap menyengsarakan buruh sudah mengalami perubahan tidak seperti informasi yang telah ramai beredar di media sosial.

8 Memakai Masker Terlalu Lama dapat Menyebabkan Kematian Akibat Keracunan Karbon Dioksida [HOAKS]

Penjelasan :

Telah beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi sebuah video dan tangkapan layar dengan klaim bahwa memakai masker terlalu lama dan terlalu sering dapat menyebabkan hypoxia dan meninggal karena keracunan karbon dioksida (CO₂).

Setelah ditelusuri, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari situs Hopkinsallchildrens.org, Spesialis penyakit menular pediatrik Matthew Thomas, M.D mengatakan, saat kita mengeluarkan napas, karbon dioksida meninggalkan paru-paru dan keluar dari tubuh melalui hidung atau mulut. Karbon dioksida merupakan gas yang terdiri dari molekul kecil. Molekul-molekul ini sangat kecil sehingga bisa melewati banyak bahan, termasuk bahan yang digunakan untuk membuat masker. Jika kita menggunakan masker kain atau medis, karbon dioksida akan masuk dengan aman. Itu tidak akan menumpuk di dalam masker atau membuat kita sakit.

9 BPOM Halangi Penyuntikan Vaksin COVID-19 [HOAKS]

Beredar di media sosial sebuah postingan berisi klaim vaksin COVID-19 dihalangi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berikut isi postingannya, "Vaksin korona sudah siap diberikan, eh skrg terhalang oleh BPOM".

Faktanya, klaim yang menyebut BPOM menghalangi vaksin COVID-19 adalah salah. Hingga saat ini memang belum ada izin edar untuk vaksin COVID-19. BPOM memastikan vaksin boleh disuntikkan jika sudah ada izin EUA untuk keamanan. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ditemukan artikel berjudul "BPOM Ungkap Syarat Emergency Use Authorization pada Vaksin COVID-19 di Indonesia" yang tayang 23 Oktober 2020 di Liputan6.com. Dalam artikel itu BPOM menjelaskan vaksin COVID-19 bisa disuntikkan jika sudah ada Emergency Use Authorization (EUA). EUA merupakan persetujuan penggunaan obat atau vaksin yang belum mendapatkan izin edar keadaan darurat atau emergensi. Menurut Direktur Registrasi Obat BPOM, Lucia Rizka Andalusia, ada beberapa aspek yang BPOM nilai untuk memberikan EUA, yakni dengan melakukan evaluasi data mutu, data klinis, serta informasi lain terkait dengan hal tersebut. Ini dasar pemberian EUA untuk vaksin itu.

10 Pesan Berantai Berisi Pencegahan Virus Corona yang Mengatasnamakan UNICEF [HOAKS]

Penjelasan :

Beredar pesan berantai mengatasnamakan UNICEF (United Nations International Children Education Fund) yang kemudian disebar di media sosial terkait tips pencegahan Virus Corona.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Cek Fakta Liputan6.com ditemukan adanya artikel yang membantah kebenaran pesan berantai tersebut, salah satunya adalah thequint.com dengan judul artikel "Message on Coronavirus (COVID-19) Neither From UNICEF Nor Accurate". Dalam artikel itu dijelaskan bahwa pesan berantai yang tersebar bukan berasal dari UNICEF, melainkan diduga berasal dari sumber yang tidak terverifikasi. Adapun pedoman pencegahan COVID-19 yang dikeluarkan UNICEF diunggah pada situs resmi UNICEF, unicef.org dengan judul "Coronavirus disease (COVID-19): What parents should know".

Terima DIPA 2021, Menkominfo: Mari Kerja Bersama

Jakarta, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021. Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan, penyerahan DIPA dari Presiden menandakan dimulainya kerja bersama-sama ekosistem Kementerian Kominfo untuk tahun 2021. "Saya ucapkan selamat dan kita bekerja sama-sama, dan bersama-sama bekerja untuk ini. Ini kerja sama-sama," ujarnya dalam Rapat Bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta Staf Khusus

Menteri di Ruang Ops Room Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Menurut Menteri Kominfo, pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga mempunyai satuan kerja masing-masing bertanggungjawab atas penyelenggaraan DIPA 2021. Namun, Menteri Johnny menegaskan hal tersebut menjadi tugas bersama. "Karena ini tugas bersama kita, marilah kita sama-sama sukseskan," ajaknya.

Sebelumnya, dalam penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021, untuk seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Presiden Joko Widodo menekankan kecepatan, ketepatan, dan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama mengenai upaya merespons pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini.

Joko Widodo untuk melakukan akselerasi transformasi digital, di mana salah satu arahnya adalah penyediaan talenta atau SDM digital yang berkualitas," jelasnya.

Bangun Kolaborasi
Menteri Kominfo menilai Program Startup Studio Indonesia merupakan wujud semangat kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk peserta maupun para mentor. "Program ini dapat berjalan dengan baik atas hasil kolaborasi antara pemerintah, pegiat startup digital, praktisi, akademisi dan juga para penanam modal ventura di industri ini," ujarnya.

Hal itu juga tercermin dalam kegiatan Program Startup Studio Indonesia yang mencakup *more brainstorming less classes*. Artinya peserta akan lebih banyak melakukan diskusi berbobot dengan para mentor. "Hingga para finalis diharapkan dapat mengembangkan skala bisnis mulai dari aspek *fundraising, group marketing* hingga teknologi *development*," tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Johnny mengungkapkan kebanggaannya atas peran strategis startup digital dalam memajukan perekonomian Indonesia. Sebab, peran startup dirasakan manfaat langsung dari masyarakat.

Startup Studio Indonesia merupakan program intensif bagi *early-stage startup* untuk mengakselerasi skala bisnis yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo. Inisiatif dari program ini sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo dalam upaya memperbaiki ekosistem ekonomi digital, mempermudah sumber pendanaan, mentoring, kerja sama dengan lembaga investasi dunia, birokrasi dan regulasi yang kondusif.

“

Para finalis diharapkan dapat mengembangkan skala bisnis mulai dari aspek *fundraising, group marketing* hingga teknologi *development*

Ajak Difabel Wujudkan Transformasi Digital Inklusif, Kominfo Terapkan Langkah Afirmatif

Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali menggelar Kompetisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional untuk Disabilitas secara Daring. Menurut Menteri Kominfo Johnny G. Plate, kompetisi ini menjadi langkah afirmatif untuk mengajak kalangan difabel untuk turut andil mewujudkan Transformasi Digital Indonesia.

"Hari ini kita bisa menghadiri kegiatan keberpihakan, suatu langkah afirmatif dari Kementerian Kominfo dan lingkungannya, mitra-mitranya dan ekosistemnya menunjukkan rasa empati dan mengajak serta kaum difabel Indonesia untuk mengambil bagian secara konkret dalam transformasi digital Indonesia," ujarnya dalam Pembukaan Kompetisi TIK Nasional untuk Disabilitas, di Museum Nasional, Jakarta, Jum'at (27/11/2020).

Menteri Kominfo menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia meyakini transformasi digital

bukan hanya mengenai pembangunan infrastruktur fisik, melainkan juga menyoal bagaimana teknologi dapat menjadi katalis peningkatan kapasitas masyarakat secara inklusif dan humanis.

Bagi Menteri Kominfo, Program Kompetisi TIK Nasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Kominfo bersama BAKTI Kementerian Kominfo untuk memperluas kesempatan dan mengembangkan ekosistem transformasi yang lebih inklusif. Oleh karena itu, Menteri Johnny mengapresiasi semua pihak yang ikut mendukung kompetisi itu.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo telah mengadakan pelatihan sebanyak dua kali pada tahun 2016 dan 2017 dengan masing-masing 500 peserta. Tahun ini, pelatihan kembali diadakan secara daring dengan jumlah peserta hingga sekitar 1.600 orang dan menjangkau hingga pulau-pulau

terluar di wilayah nusantara kita. Dari 291 orang yang mengikuti pelatihan ini berasal dari desa-desa tertinggal, terdepan dan terluar atau yang dikenal dengan wilayah 3T. Dan 19 orang diantaranya yang meminta asistensi khusus terkait jaringan internet atau hanya 19 dari 291 orang.

Transformasi Digital Seiring dengan agenda percepatan Transformasi Digital Nasional, menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo memberikan perhatian khusus kepada kaum difabel dengan mendukung adopsi teknologi dalam inovasi-inovasi yang dapat menjawab keterbatasan sosial yang ada. "Termasuk tentunya dalam hal ini kaum difabel. Beberapa startup telah menunjukkan bagaimana penerapan teknologi dapat menjawab berbagai tantangan dan menjadi alat untuk penyeteraan," jelasnya.



KALEIDOSKOP
KOMINFO
2020

JANUARI

Mengawali tahun 2020, Menkominfo menyapa seluruh sivitas Kementerian Kominfo dalam ajang temu akbar tahunan bertajuk Kominfo Connect. Ini merupakan kali pertama Menteri Johnny G. Plate bertatap muka dengan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Kominfo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa ASN dituntut untuk menjadi penggerak Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan jiwa Pancasila dan semangat konstitusi negara yang melekat di dada masing-masing.

Sementara itu, berkaitan dengan terjadinya bencana banjir awal tahun yang meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Kementerian Kominfo terus berkoordinasi dengan operator telekomunikasi untuk upaya pemulihan infrastruktur dan layanan telekomunikasi. Jika di tanggal 1 Januari terdapat 10,7% *Base Transceiver Station* dari total 22.867 yang tidak berfungsi, maka per tanggal 7 Januari tercatat sebanyak 99,8% sudah normal kembali, dengan sisa BTS yang belum berfungsi tinggal 0,2% atau 46 BTS di seluruh Jabodetabek.



Menjelang akhir Januari, Menkominfo terbang ke Davos, Swiss, menghadiri perhelatan tahunan World Economic Forum (WEF) Annual Meeting untuk memaparkan strategi komprehensif pemerintah dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi digital.

Dalam forum tersebut, Menkominfo juga melakukan pertemuan bilateral dengan tokoh-tokoh terkemuka dunia, di antaranya adalah Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Kerajaan Arab Saudi (Abdullah Alswaha), CEO Youtube (Susan Wojcicki), CEO Google Cloud (Thomas Kurian). Menkominfo juga dijadwalkan berdiskusi empat mata dengan Profesor Klaus Schwab (Pendiri dan Executive Chairman WEF). Profesor Klaus Schwab juga dikenal dengan bukunya, *The Fourth Industrial Revolution*.

Januari ditutup dengan penyerahan Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, melalui Surat Presiden No. R-05/Pres/01/2020 tertanggal 24 Januari 2020.

Sumber Foto : Unsplash | Markus Spiske

FEBRUARI

Memasuki bulan Februari, Menkominfo menggelar pertemuan konsultasi terkait Rancangan UU Pelindungan Data Pribadi dengan Ketua DPR RI Puan Maharani dan sejumlah Pimpinan DPR RI serta Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi I. Pertemuan tersebut menyepakati pembahasan RUU PDP dilakukan secara terbuka, meski ada beberapa bagian yang tetap tertutup.

Menurut Menkominfo, dalam RUU PDP terdapat 15 BAB dan 72 pasal yang sangat spesifik, tetapi kontennya menyangkut hak-hak yang sifatnya sangat rasional dan *private*. "Karenanya harus dibicarakan secara menyeluruh, secara luas dan mengajak partisipasi publik yang luas dalam suatu proses politik di DPR ini yang akuntabel dan pruden," kata Menteri Johnny.

Rancangan UU PDP akan menjadi standar pengaturan nasional tentang pelindungan data pribadi, baik data pribadi yang berada di Indonesia maupun data pribadi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Ada tiga poin penting dalam pelindungan data, yakni kedaulatan data, pelindungan terhadap pemilik data pribadi dan hak-hak pemilik data pribadi, serta kewajiban pengguna data pribadi.

Lalu pada 25 Februari 2020, Pemerintah dan DPR RI secara resmi mulai membahas RUU PDP yang diawali dengan Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I bersama Komisi I dengan Agenda Penyampaian Penjelasan Pemerintah tentang RUU PDP. Pemerintah diwakili tiga Kementerian, yakni Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Menutup bulan Februari, pemerintah mengumumkan penetapan skema *whitelist*, yaitu proses pengendalian secara preventif agar masyarakat mengetahui terlebih dahulu legalitas perangkat yang akan dibelinya, untuk implementasi pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang akan mulai berlaku pada 18 April mendatang.

Pengendalian IMEI dilaksanakan untuk memastikan pelindungan konsumen perangkat telekomunikasi dalam membeli dan menggunakan perangkat yang sah (legal) dan memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menyambungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi.



MARET

Maret 2020 ditandai dengan munculnya kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Indonesia siaga satu. Pemerintah secara cepat mengambil berbagai kebijakan, mempertegas dan mempercepat perubahan protokol penanganan untuk merespons dampak penyebaran sesaat setelah informasi Virus Corona masuk ke Indonesia.

Kementerian Kominfo pun turut mengambil peran dalam penanganan dampak penyebaran virus ini. 19 Maret 2020, Menkominfo menggelar konferensi pers tentang dukungan kebijakan yang diambil untuk memberikan layanan prima telekomunikasi dan penyiaran dalam mengatasi penyebaran COVID-19.

Dukungan tersebut di antaranya melakukan pengukuran kualitas layanan (*Quality of Service/QoS*) di wilayah permukiman, serta penyediaan *bandwidth* untuk memastikan kualitas layanan telekomunikasi yang baik dalam mendukung kebijakan Presiden terkait bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Selain itu pemerintah bersama operator telekomunikasi juga memberi akses gratis pada situs resmi Pemerintah RI tentang COVID-19, www.covid19.go.id.

Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan WhatsApp dan Telkom Group untuk penyediaan chatbot WA dengan nama akun covid19.go.id, yang dapat digunakan publik untuk memperoleh informasi secara interaktif dengan konten yang disediakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan RI.

Selain itu juga menyediakan kanal informasi bagi BNPB dan Kemenkes dalam menyebarluaskan informasi penanganan pandemi COVID-19 berupa *SMS blast*, *call center* 117 dan 119, *Public Service Announcement* (PSA) oleh Lembaga Penyiaran Publik dan Swasta maupun penyedia layanan akses internet (ISP).

Tak hanya itu, Kementerian Kominfo bersama Kemenkes, Kementerian BUMN, BNPB, dan operator telekomunikasi meluncurkan aplikasi PeduliLindungi dengan fungsi *tracing* (penelusuran), *tracking* (pelacakan), dan *fencing* (pengurungan) untuk mendeteksi COVID-19.

Kominfo juga secara aktif memantau sebaran hoaks melalui Tim AIS. Per 17 Maret, ditemukan 242 konten dan disinformasi yang berkaitan dengan COVID-19. Menkominfo menyatakan akan terus melakukan identifikasi dan konfirmasi kebenaran isu untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif informasi yang tidak benar terkait dengan COVID-19.



Di lingkup internal, Kementerian Kominfo menerapkan mekanisme kerja *Work From Home* bagi para pegawai dengan sistem bergantian (*shift*) sesuai kebutuhan, dengan tetap mengedepankan kepentingan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan sistem kerja WFH terutama diperuntukkan bagi pejabat eselon IV dan pegawai non-eselon yang menggunakan transportasi umum karena rentan terhadap penyebaran virus.

Dukungan Kominfo juga dihadirkan melalui beragam pelatihan daring untuk mendorong aktivitas produktif masyarakat dari rumah, yaitu program Digital Talent Scholarship yang terbagi dalam Online Academy dan Digital Entrepreneurship Academy, program Literasi Digital Siberkreasi dengan pilihan Siberkreasi Class Online dan School of Influencer Online Meeting, serta Digital Technopreneur.

APRIL

Memasuki April, Indonesia masih berjibaku menekan penyebaran dan menangani dampak COVID-19. Gerak bersama dengan seluruh elemen masyarakat diperkuat. Narasi yang diangkat adalah “Bersatu Melawan COVID-19”. Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja virtual bersama Anggota Komisi I DPR menekankan bahwa pemerintah melibatkan unsur *pentahelix*, yaitu pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media; secara sistematis dan komprehensif untuk mendukung penanganan dampak virus corona.

Gotong royong penanganan pandemi juga diluncurkan dalam bentuk Portal Integrasi Data Bersatu Lawan COVID-19 (BLC). Portal yang mengintegrasikan data dan keterbukaan data penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia ini mampu memantau data sebaran kasus positif, pasien positif yang

sembuh dan meninggal, orang dalam pemantauan (ODP), serta pasien dalam pengawasan (PDP). Serta dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan logistik RS dan laboratorium dalam penanganan COVID-19, untuk dijadikan landasan dalam pembuatan kebijakan ke depannya.

Pemerintah juga meluncurkan layanan psikologi Sehat Jiwa (SEJIWA), yang bisa diakses melalui telepon ke nomor 119 ext. 8. Layanan ini ditujukan untuk membantu penanganan kesehatan jiwa selama pandemi COVID-19, mengingat kondisi psikologis dapat berdampak besar terhadap daya tahan tubuh untuk menangkal virus corona.

Penanganan hoaks terkait COVID-19 juga terus ditingkatkan. Hingga 7 April, ditemukan 1.096 isu hoaks terkait COVID-19 yang tersebar di platform Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube.

Sebanyak 359 konten sudah dilakukan penindakan dengan *take down*, dan 737 konten lainnya sedang dalam proses untuk ditindaklanjuti. Sementara itu ada 77 kasus hoaks yang ditangani oleh Polda dan Bareskrim Polri.

Sementara itu implementasi aturan pengendalian IMEI tetap berjalan, berlaku secara efektif terhitung 18 April 2020. Pengguna perangkat HKT (*handphone*, komputer genggam dan tablet) akan mendapatkan notifikasi dan pemberitahuan mengenai status IMEI secara bertahap dari operator seluler yang digunakan dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) minggu. Pelaksanaan aturan pengendalian IMEI ini berlaku ke depan, sehingga perangkat yang sudah aktif sebelum masa berlaku 18 April 2020 akan tetap dapat tersambung ke jaringan bergerak seluler sampai perangkat tersebut tidak ingin digunakan lagi atau telah rusak.





Sumber Foto : Unsplash | Ubaid



Sumber Foto : Unsplash | Sangga Rima



MEI

Dalam Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-112 yang dilangsungkan secara virtual, Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyebut bahwa peringatan yang berlangsung dalam situasi pandemi ini menjadi momentum bagi seluruh Bangsa Indonesia untuk bangkit dalam optimisme normal baru. Menteri Johnny berharap, kebangkitan nasional tidak sekadar diperingati sebagai ritual

belaka. Ada nilai-nilai afektif dan edukatif yang dapat dijadikan teladan untuk generasi masa kini dan yang akan datang.

Sementara itu, menyambut Hari Raya Idulfitri di era normal baru, Menkominfo memastikan kesiapan dukungan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan trafik dalam pelaksanaan silaturahmi digital Idulfitri, di antaranya menjaga kinerja jaringan telekomunikasi agar terus

dapat memberikan layanan yang baik, menambah kapasitas pada BTS dan menyiapkan 178 mobile BTS apabila diperlukan, menjaga keberlangsungan jaringan telekomunikasi di titik-titik strategis pada kondisi PSBB seperti di area pemukiman, jalan tol, puskesmas dan rumah sakit rujukan layanan COVID-19, serta melakukan monitoring jaringan telekomunikasi melalui Network Operation Center (NOC) yang beroperasi selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu.



JUNI

Setelah tiga bulan memberlakukan sistem *work from home* (WFH) bagi pegawainya, Kemkominfo mulai menetapkan kebijakan Pelaksanaan Kerja di Kantor dan Fleksibilitas Tempat Bekerja (*Flexible Working Space*) dengan tetap memperhatikan protokol pelaksanaan kerja. Penerapan sistem ini merupakan upaya Kementerian Kominfo mengubah pola pikir, budaya kerja, dan proses bisnis dalam menghadapi era kenormalan baru.

Kementerian Kominfo juga tengah menyiapkan 5 Program Prioritas Tahun 2021 untuk mempercepat transformasi digital menuju masyarakat digital Indonesia. Lima program tersebut adalah Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Pemanfaatan TIK, Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika, serta Komunikasi Publik.

Di bulan ini, Menkominfo juga menggelar tiga agenda pertemuan virtual untuk penguatan kerja sama global dalam isu komunikasi dan informatika menuju adaptasi kebiasaan baru. Pertemuan pertama dengan CEO Global Youtube membahas penanganan konten disinformasi atau hoaks, yang dilanjutkan dengan pertemuan kedua dengan Eksekutif Google Cloud Asia Pasifik terkait pembangunan pusat data Google Cloud, serta agenda ketiga adalah *Opening Ceremony of ASEAN-China Year of Digital Economy Cooperation*.

JULI

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia #KitaBelaKitaBeli resmi diluncurkan. Gernas BBI ini merupakan upaya mendorong transformasi digital UMKM/Umi di masa adaptasi kebiasaan baru melalui pemberian stimulus maupun fasilitasi UMKM dan Ultra Mikro. Menkominfo menyebutkan, terdapat alokasi sebesar Rp123,46 Triliun bagi UMKM/Umi dari total anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jumlah ini diharapkan dapat membantu UMKM/UMi di masa pandemi COVID-19.

Sementara itu, saat menghadiri G20 Digital Economy Ministerial Meeting secara virtual, Menkominfo menyerukan prinsip kedaulatan dan keamanan data. Ada lima proposisi Indonesia yang diakomodasi dalam G20 DETF Ministerial Declaration, yaitu proposisi mengenai Cross-Border Data Flows; proposisi pada The Principle of Lawfulness, Fairness, and Transparency; proposisi terkait The Principle of Reciprocity; proposisi terkait Interoperability and Transfer Mechanism; serta terakhir, berkaitan dengan Data Protection and Privacy.

AGUSTUS

Untuk keempat kalinya, Kementerian Kominfo kembali menerima Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Perolehan Opini WTP ini didasarkan pada standar pemeriksaan atas empat kriteria dasar, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Di bulan ini juga dilakukan Penandatanganan NKA antara Kementerian Kominfo bersama



KPU dan Bawaslu tentang Pengawasan Konten Internet dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Menteri Kominfo Johnny G. Plate menegaskan kesepakatan itu merupakan bagian dari komitmen Pemerintah dalam ruang digital yang sehat dan bersih.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar program intensif bagi *early-stage startup* untuk mengakselerasi skala bisnis agar dapat mempercepat transformasi digital di Indonesia. Program bernama *Startup Studio Indonesia* itu ditargetkan dapat memfasilitasi pelaku startup digital pada tahap *Angle* hingga *pre-series A* serta membuka peluang inovasi baru.

SEPTEMBER

Sehat, Semangat! Adalah sepotong pesan Menkominfo bagi keluarga besar sivitas Kominfo untuk tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Pesan ini disampaikan setelah Kementerian Kominfo kembali menerapkan kebijakan work from home bagi seluruh pegawai Kominfo, menyusul teridentifikasinya 49 pegawai yang positif COVID-19. Ia juga mengingatkan agar tetap menerapkan protokol kesehatan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan ditambah M keempat yaitu menjauhi kerumunan yang berpotensi menularkan COVID-19.

Sementara itu, kabar gembira datang dari Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi yang dinobatkan sebagai Winner dalam Kontes World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2020. GNLD Siberkreasi meraih Winner dari Action Lines WSIS C4 Capacity Building yang terkait dengan pemenuhan tujuan SDGs Goal 4: Quality Education.

Di bulan ini juga dilakukan Penandatanganan Preparatory Work Agreement (PWA) Proyek Satelit Multifungsi Republik Indonesia (SATRIA), yang menandai kesepakatan antara PT Satelit Nusantara Tiga (SNT)

sebagai bagian dari konsorsium Pasifik Satelit Nusantara (PSN) dengan perancang dan pabrikan asal Perancis, Thales Alenia Space (TAS), untuk memulai pekerjaan manufacturing satelit SATRIA.

Tak hanya itu, pengajuan Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) RAPBN TA 2021 sebesar Rp16,9 Triliun untuk percepatan transformasi digital nasional juga disetujui oleh Komisi I DPR RI, yang disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR mengenai Pembahasan Pagu Anggaran Kominfo TA 2021, Rabu (23/09/2020)

JOHNNY G. PLATE
Menkominfo RI

SEHAT, SEMANGAT!

Kita Tak Akan Melambat, Tak Akan Padam



OKTOBER

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Senin (05/10/2020) membawa perubahan penting dalam sektor telekomunikasi, penyiaran, dan pos di Indonesia. Menurut Menkominfo, UU Cipta Kerja sangat mendukung Program Transformasi Digital Nasional, proses migrasi siaran TV analog ke digital, penyehatan industri telekomunikasi dan penyiaran serta optimalisasi sumber daya terbatas yaitu spektrum frekuensi radio, serta pemanfaatannya untuk kepentingan nasional.

Berkaitan dengan transformasi digital, Menkominfo dalam pertemuan ITU Virtual Digital World 2020 menyampaikan empat inisiatif prioritas Indonesia untuk mempercepat transformasi digital, yaitu meningkatkan infrastruktur *digital last-mile*, mendirikan Pusat Data Nasional dan Pusat Pemantauan Telekomunikasi Nasional, pengembangan talenta digital dengan pendekatan komprehensif yang berfokus pada peningkatan literasi digital, peningkatan keterampilan dan daya saing digital, serta pengesahan UU Pelindungan Data

Pribadi dan PM tentang Penyelenggara Sistem Elektronik di Sektor Swasta.

Sementara itu terkait penanganan dampak pandemi COVID-19, Menkominfo melakukan akselerasi penyediaan akses internet di fasilitas layanan kesehatan (*fasyankes*) di seluruh Indonesia, dengan tiga agenda utama yaitu optimalisasi telekomunikasi antar dan intra *fasyankes*, peningkatan kualitas arus data *fasyankes*, serta pemanfaatan aplikasi kesehatan berbasis digital khususnya di daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).



Sumber Foto : Unsplash | Nasa

NOVEMBER

Memasuki bulan November, Kementerian Kominfo membuka seleksi pengguna pita frekuensi radio 2.3 GHz pada rentang 2360 – 2390 MHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler. Seleksi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jaringan bergerak seluler, meningkatkan kualitas layanan secara maksimal, serta mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur TIK dengan teknologi generasi kelima (5G).

Sementara terkait perkembangan situasi pengadaan Satelit Multifungsi SATRIA-1, pemerintah telah menyiapkan tiga langkah antisipasi agar proyek SATRIA-1 tetap berjalan normal meski adanya potensi mundurnya jadwal penempatan di orbit pada Maret 2023, di tengah situasi pandemi COVID-19. Langkah pertama yaitu mengajukan usulan perpanjangan waktu dengan argumentasi *force majeure*, yang kedua memiliki *back up filing* satelit yang sudah didaftarkan di ITU sebagai cadangan, serta opsi

menyewa dan menempatkan Satelite Floater dalam jangka waktu tertentu di slot orbit PSN 146-E untuk memenuhi kewajiban regulasi ITU.

Berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kominfo berhasil menyabet predikat Badan Publik dengan Kategori Informatif selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Predikat ini didapat melalui proses penilaian dari Komisi Informasi Pusat yang dilakukan mulai dari Bulan September.

Di akhir November, Vturut digelar acara Puncak Anugerah Jurnalistik Kominfo 2020 yang tahun ini mengangkat tema "Bangkit dari Pandemi COVID-19, Menuju Masyarakat Produktif". Ajang tahunan ini merupakan bentuk apresiasi pada jurnalis, terutama di tengah pandemi yang secara konsisten menyajikan informasi akurat bagi masyarakat seputar upaya bersama pemerintah dan masyarakat untuk bangkit dari situasi pandemi COVID-19.



DESEMBER

Akhir tahun dibuka dengan forum Serap Aspirasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Norma Standar Prosedur Kriteria Perizinan Berusaha (RPP NSPK) untuk Bidang Komunikasi dan Informatika, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (RPP Teknis). Kedua RPP ini, menurut Menteri Johnny G. Plate, memiliki peran strategis bagi terselenggaranya transformasi digital, khususnya di masa pandemi.

RPP NSPK mengatur jenis perizinan berusaha sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan e-commerce yang disusun berdasarkan analisis perizinan berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA), yaitu tingkat risiko usaha rendah, menengah atau tinggi.

Sedangkan RPP Teknis mengatur hal-hal teknis di sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran dalam mendukung ekonomi digital nasional. Pengaturan dalam RPP Teknis mencakup implementasi Analog Switch Off (ASO) tahun 2022, pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi secara bersama baik infrastruktur aktif maupun pasif, serta pencegahan inefisiensi dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio.

Menurut Menteri Kominfo, pemberlakuan kedua RPP tersebut juga diharapkan mendorong penyehatan industri pos, telekomunikasi, penyiaran, dan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (e-commerce), serta optimalisasi sumber daya terbatas yaitu spektrum frekuensi radio, serta pemanfaatan untuk kepentingan nasional.



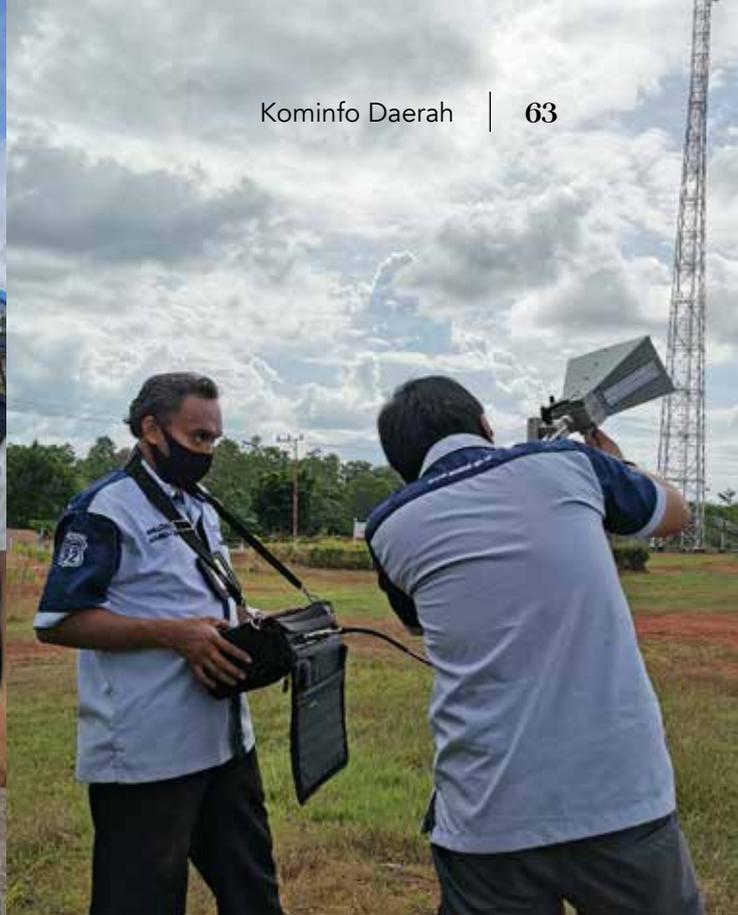


Balmon Merauke

Rutinitas kegiatan inspeksi untuk validasi data ISR Penyelenggara Telekomunikasi Selular PT. Telkomsel di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Papua yang dilaksanakan oleh tim dari Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, Papua, Sabtu (21/11/2020).

Pelaksanaan inspeksi dipimpin langsung oleh Simson Liha, Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Merauke. Hal ini dilaksanakan dalam rangka menjamin penggunaan frekuensi *radio microwave link* oleh PT. Telkomsel sesuai dengan izin yang dimiliki agar terhindar dari potensi interferensi atau gangguan. Dengan demikian, masyarakat di pedalaman perbatasan Indonesia dapat menggunakan sarana telekomunikasi dengan lancar karena lokasi yang cukup jauh dan untuk mengefisienkan waktu. Walaupun cuaca hujan, pemeriksaan oleh petugas tetap dilaksanakan.



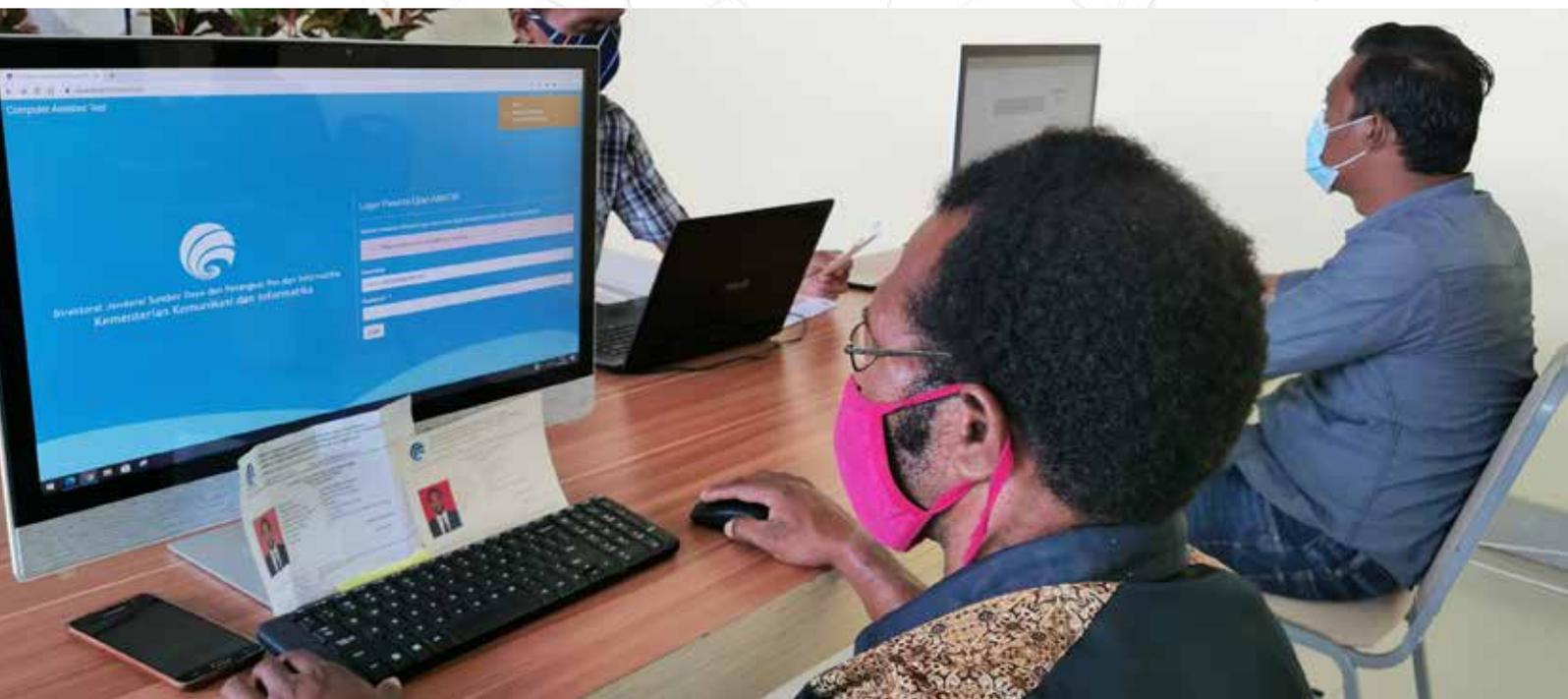


(atas)

Kegiatan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Bandar Udara Mopah Merauke oleh Balai Monitor SFR Kelas II Merauke (30/06/2020). Bersama dengan petugas dari AirNav Merauke, dilakukan pelacakan sumber pancaran gangguan frekuensi dengan menyisir lokasi bandara dan sekitarnya. Gangguan frekuensi atau interferensi terjadi setelah Bandara Mopah ditutup (*lockdown*) selama kurang lebih 3 bulan sejak Maret 2020.

(bawah)

Pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) Reguler periode ketiga pada Sabtu, 7 November 2020, sebagai bentuk komitmen pelayanan perizinan kepada masyarakat Papua yang memiliki animo tinggi untuk menjadi anggota radio amatir.





Balmon Kupang

Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Kupang, Nusa Tenggara Timur secara rutin melaksanakan monitoring penggunaan frekuensi di seluruh wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste dengan memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan akses informasi dan telekomunikasi, yaitu siaran televisi, radio sampai dengan penggunaan sinyal seluler secara baik.

Mengawal frekuensi di perbatasan bukanlah perkara yang mudah. Tidak jarang tim dari Balmon SFR Kelas I Kupang harus menempuh medan yang terjal untuk sampai pada titik lokasi yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Demi memperoleh data hasil monitoring yang valid, tim Balmon SFR Kelas I Kupang juga melakukan *mini survey* kepada masyarakat perbatasan dengan pertanyaan sebagian besar mengenai ketersediaan akses informasi dan telekomunikasi.



Menteri Kominfo Johnny G. Plate usai penyerahan bantuan Peduli Korban Banjir Jabodetabek dan Sekitarnya bersama Mitra Kerja di Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari, Jakarta, Selasa (07/01/2020).

2020 Januari

Suasana kemeriahan Kominfo Connect, temu akbar sivitas Kementerian Kominfo pada Kamis, (30/01/2020) di Ecovention Ancol, Jakarta Utara.





Maret

Konferensi Pers Online mengenai Dukungan Platform Digital Memudahkan Proses *Social Distancing*: Bekerja, Belajar dan Beribadah di Rumah, dari Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Senin (23/03/2020). Hadir dalam konpers tersebut perwakilan Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Halodoc, dan Ruangguru.



Menkominfo memberikan dukungan atas peluncuran Layanan Sehat Jiwa (SEJIWA) melalui konferensi video di Jakarta, Rabu (29/-4/2020). Layanan Sejiwa ditujukan untuk membantu penanganan kesehatan jiwa selama pandemi COVID-19

April



Dalam Rapat Kerja bersama Anggota Komisi I DPR RI melalui konferensi video dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (07/04/2020), Menteri Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melibatkan unsur *pentahelix*, yakni pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media dalam mendukung penanganan dampak COVID-19



Mei

Menkominfo menyapa para sivitas dan mitra kerja dalam Lebaran Virtual Bersama Kominfo dari kediamannya di Jakarta, Minggu (24/05/2020). Dalam perayaan Idulfitri 1441 H ini, Menteri Johnny mengajak seluruh pegawai, mitra kerja, dan masyarakat Indonesia untuk berdamai dengan pandemi COVID-19.



Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengikuti Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila dari kediamannya di Jakarta, Senin (01/06/2020). Upacara yang berlangsung secara virtual itu dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara.

Juni



Prosesi penyambutan kedatangan Menkominfo secara adat di Kecamatan Demon Pagong, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Kamis (25/06/2020). Kunjungan ini dalam rangka Peresmian Akses Internet Layanan Kesehatan di Puskesmas Demon Pagong.



Juli

Penyerahan hewan qurban secara simbolis dalam peringatan Hari Raya Iduladha 1441 H di Masjid At-Taqwa Kementerian Kominfo, Kamis (30/07/2020).

2020



Menkominfo saat Penandatanganan Preparatory Work Agreement Proyek Satelit Mutifungsi Republik Indonesia (SATRIA), Kamis (03/09/2020). Penandatanganan ini menandai dimulainya pekerjaan manufacturing satelit SATRIA antara PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) dengan perancang dan pabrikan asal Perancis Thales Alenia Space (TAS).



2020 Agustus

Mengenakan pakaian daerah, Menteri Kominfo Johnny G. Plate dan jajaran pejabat Eselon I Kementerian Kominfo mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia secara virtual dari Ruang Serbaguna Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (17/08/2020).



Penyampaian Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2019 oleh BPK, Kamis (06/08/2020). Sejak tahun 2016 Kementerian Kominfo telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut.

2020 September

Menkominfo mengapresiasi hasil kesepakatan atas 66 Daftar Inventaris Masalah (DIM) antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam Rapat Kerja Pembahasan Materi DIM RUU PDP di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (07/09/2020).



Oktober

Menkominfo berbincang dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka Dukungan Infrastruktur Telekomunikasi Wilayah Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (16/10/2020).





2020 November

Peluncuran Buku 50 Karya Terbaik Anugerah Jurnalistik Kominfo 2020 dalam Puncak AJK yang digelar di Aula Anantakupa Kementerian Kominfo, Selasa (17/11/2020)



Dalam kunjungan kerjanya ke perbukitan Menoreh, DI Yogyakarta, Jumat (16/10/2020) Menteri Johnny G. Plate mendorong warga desa mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).